

#temanbinanusa



**PT. BINANUSA PRACETAK & REKAYASA**  
Consultant & Construction Engineering  
Since 1999

# COMPANY PROFILE

**FOR A BETTER  
CONSTRUCTION  
QUALITY**



**CONSULTANT AND  
CONSTRUCTION  
ENGINEERING**

**SINCE 1999**

Supported by :



CSI Etabs 20



CSI SAP 2000



[www.binanusa.co.id](http://www.binanusa.co.id)

**DAFTAR ISI**

Pendahuluan ..... 1

Jajaran Direksi ..... 2

Struktur Organisasi ..... 3

Layanan & Produk ..... 4

**LAMPIRAN - LAMPIRAN :**

Legalitas ..... 11

Laporan Pajak Tahunan..... 53

Pernyataan Kepemilikan Rekening..... 54

Pakta Integritas..... 55

Klien ..... 56

Pengalaman Pekerjaan ..... 57



## PENDAHULUAN

**PT** Binanusa Pracetak & Rekayasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan konstruksi khususnya di bidang investigasi, perencanaan, pengawasan dan pekerjaan retrofitting, mechanical, electrical dan sejenisnya.

Sejalan dengan misi kami yaitu berpartisipasi dalam pembangunan Nasional, PT Binanusa Pracetak & Rekayasa menyediakan layanan kepada pelanggan dengan kualitas terbaik, harga yang kompetitif, dan waktu yang tepat.

PT Binanusa Pracetak & Rekayasa didirikan oleh Ir. Sjafei Amri, Dipl. E. Eng pada tahun 1999, sampai dengan hari ini telah banyak proyek yang kami selesaikan meliputi hampir seluruh wilayah di Indonesia. Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami dan tentu saja hal ini bisa tercapai dengan komitmen dan dukungan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan berpengalaman di bidangnya, peralatan yang berkualitas dan persediaan yang cukup.

Kami berharap hal ini akan menghasilkan kerja sama yang saling menguntungkan baik dengan pelanggan yang terdahulu ataupun pelanggan baru di tahun-tahun berikutnya, dan kedepannya kami mengharapkan dukungan yang tak henti-hentinya.



## VISI & MISI

**VISI** Menjadi konsultan terkemuka dalam kualitas Audit Forensik Struktur Bangunan / Rancang Bangun / Produk barang teknik dan pelayanan.

**MISI** Menyelenggarakan layanan Audit Forensik Struktur Bangunan / Rancang Bangun dan Produk barang teknik yang efektif, efisien, inovatif dan berkualitas melalui keunggulan sumber daya manusia, teknologi, peralatan serta metoda kerja yang profesional.

## JAJARAN DIREKSI



### **IKHWANUL AMRIL**

Direktur Utama

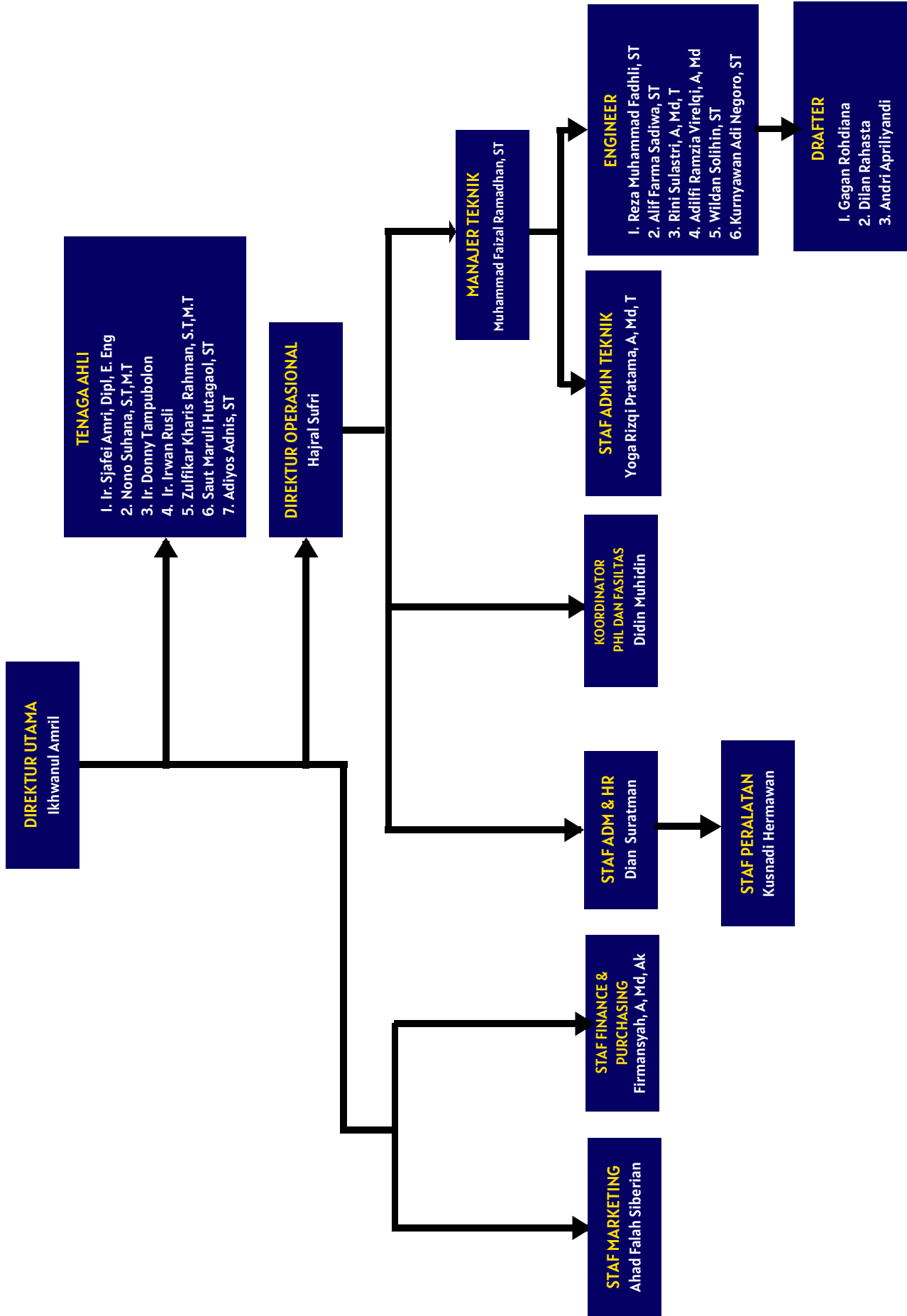
Mengawali pengalaman bekerja pada PT Binanusa Pracetak & Rekayasa pada tahun 2019 sebagai Direktur Marketing hingga tahun 2022, lalu menjabat sebagai Direktur Operasional & Marketing pada tahun 2022 hingga 2023, selanjutnya menjabat Direktur Utama pada tahun 2024 hingga saat ini.



### **HAJRAL SUFRI**

Direktur Operasional

Mengawali pengalaman bekerja pada PT Binanusa Pracetak & Rekayasa sebagai Staff Administrasi, Human Resource, dan System Network pada tahun 2014 hingga tahun 2021, lalu menjabat sebagai Manajer Operasional & Marketing pada tahun 2022 hingga 2023, selanjutnya menjabat sebagai Direktur Operasional pada tahun 2024 hingga sekarang.



## LAYANAN & PRODUK

Tujuan dari pada dilakukannya layanan audit struktur bangunan adalah agar terhindar dari kerusakan yang lebih besar sehingga keamanan penghuni dan bangunan itu sendiri dapat tetap terjaga. Setiap bangunan tentunya memiliki daya tahan yang berbeda-beda tergantung dari beban yang diterima dan juga material yang digunakannya. Jika bangunan tersebut mulai menimbulkan beberapa gejala yang mengindikasikan adanya kerusakan seperti adanya retakan halus, kondisi struktur terlihat miring dan sebagainya maka harus segera dilakukan audit struktur bangunan.

Contoh lain indikasi perubahan dan juga penyimpangan pada suatu bangunan yaitu timbulnya retakan pada dinding, penurunan pondasi, kebakaran, serta penambahan dan juga pengurangan lantai bangunan sehingga terjadi perubahan struktur.

Ketika menganalisa bagian atau audit struktur tertentu pada bangunan maka perlu dilakukan audit forensik pada struktur yang bermasalah. Setelah itu, hasil peninjauan / audit forensik struktur tersebut akan dievaluasi.

Selanjutnya, dilakukan peninjauan dengan cara menguji bagian tertentu pada bangunan menggunakan peralatan khusus untuk uji struktur bangunan. Jika dalam pengujian tersebut ada indikasi kerusakan dan juga penurunan standar terhadap material yang dipakai, maka harus dilakukan perbaikan struktur atau perkuatan struktur bangunan.

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keamanan pengguna dan penghuni bangunan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 mengenai "Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung".



## AUDIT FORENSIK STRUKUR BANGUNAN MENCAKUP :

- Inspeksi Non Destructive Test
- Inspeksi Destructive Test
- Re-Desain Struktur Bangunan
- Desain Struktur



## MANFAAT

### 1. Identifikasi Penyimpangan Struktur Secara Tepat

Melakukan Audit Struktur Bangunan merupakan cara terbaik agar indikasi kerusakan pada struktur bangunan bisa teridentifikasi secara keseluruhan. Dengan begitu, bisa langsung dilakukan perbaikan agar tidak timbul kerusakan yang lebih besar lagi.

### 2. Biaya Operasional Menjadi Lebih Hemat

Ketika indikasi kerusakan dapat ditangani, maka struktur gedung akan lebih terawat karena tidak harus mengeluarkan biaya yang lebih besar, dengan begitu biaya operasional untuk perbaikan jauh lebih hemat.

### 3. Analisa Nilai Kerusakan Secara Valid

Dalam menganalisa kerusakan pada struktur bangunan, PT Binanusa Pracetak & Rekayasa menggunakan tenaga ahli dan professional sehingga setiap nilai kerusakan dan penyimpangan dapat ditetapkan secara tepat.

## Inspeksi Non Destructive Test

Non Destructive Test atau biasa disingkat NDT merupakan suatu teknik pengujian pada material tanpa harus merusak objek yang diujinya. Pengujian ini biasanya lebih banyak dipilih karena potensi kerusakan yang ditimbulkan pada saat proses pengujian sangat minim. Metode NDT umumnya bergantung pada penggunaan radiasi elektromagnetik, suara dan konversi sinyal lainnya untuk memeriksa berbagai macam barang (logam dan non-logam) untuk mendapatkan propertis fisik dari benda yang di uji (kekuatan, kepadatan, konfigurasi dan lain sebagainya).

Pengujian Non Destructive dapat diterapkan pada struktur lama dan baru. Untuk struktur yang baru, prinsip utama cenderung untuk pengendalian kualitas atau jika dirasa adanya keraguan tentang kualitas bahan atau konstruksi. Lain hal nya dengan struktur lama, bisa jadi setelah sekian tahun pembangunan ada masalah terhadap struktur yang dirasakan oleh penghuni bangunan saat berada di lokasi, atau dikarenakan penyebab kerusakan pada bangunan lainnya, seperti adanya gempa bumi, cuaca buruk berkepanjangan, kondisi tanah, ataupun umur bangunan itu sendiri.

Jenis pengujian Non Destructive Test :



### Rebound Hammer Test

Concrete Hammer Test Atau Rebound Hammer Test merupakan suatu metode uji yang mudah dan praktis untuk memperkirakan mutu beton permukaan.



### Concrete Rebar Scanner

Concrete Rebar Scanner atau sering disebut juga dengan Cover Meter Test adalah pengujian atau pengecekan untuk mengukur tebal selimut beton, jarak antar tulangan dan perkiraan diameter tulangan.



### Ultrasonic Pulse Velocity Test

Pengujian yang dilakukan untuk mengidentifikasi mutu integritas beton dengan pendekatan rambat gelombang ultrasonic pada beton.



### Hardness Test

Pengujian yang dilakukan untuk menentukan kekerasan suatu material baja dalam bentuk daya tahan material terhadap bola baja (identor) yang ditekan pada permukaan material uji tersebut (speciment).





### Half Cell Potential Test

Pengujian yang dilakukan untuk menghitung nilai korosi tulangan baja dalam beton. Ini merupakan Metode Pengujian Beton Tidak Merusak/ Non-Destructive Testing (NDT) dalam rekayasa teknik sipil dan struktur sebagai alat untuk mengevaluasi kekuatan, keseragaman, keawetan dan sifat-sifat lainnya dari struktur beton eksisting.



### Concrete Resistivity Test

Pengujian yang dilakukan untuk menghitung nilai korosi pada permukaan beton.



### Coating Thickness Meter Test

Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ketebalan (Thickness) cat di permukaan suatu material atau benda yang menggunakan bahan cat.



### Ultrasonic Thickness Measurement Test

Pengujian yang dilakukan untuk mengukur ketebalan logam, dan bahan-bahan non-logam misalnya aluminium, titanium, plastik, keramik, kaca dan lain sebagainya.



### Pull Out Test

Pengujian yang berfungsi mengukur besarnya gaya maksimum yang dibutuhkan untuk mencabut logam/besi yang terpasang di suatu struktur beton atau baja. Logam ini dapat ditanam sebelum maupun sesudah proses casting.



### Geo Penetrating Radar Test

Pengujian yang dilakukan untuk proses deteksi struktur pondasi ataupun tiang pancang yang ada di bawah tanah dengan tingkat kedalaman tertentu dengan menggunakan gelombang radio.

## Inspeksi Destructive Test

Sesuai dengan namanya, ini adalah pengujian yang dilakukan terhadap suatu material atau spesimen dengan cara merusak material uji nya, dengan cara ini informasi yang didapat pun akan lebih baik. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui performa pada material yang bersangkutan, salah satunya bila material tersebut dikenai kerja dari luar dengan besar gaya yang berbeda - beda.

Salah satu contoh dari pengujian ini adalah Core Drill, dimana dalam prosesnya akan diambil sample dari suatu struktur yang diragukan kekuatannya untuk kemudian di uji di laboratorium untuk mengetahui komponen apa saja yang ada di dalam sample tersebut.

Jenis pengujian Destructive Test :



### Adhesion Test

Pengujian yang dilakukan untuk mengukur daya rekat suatu material. Daya rekat adalah ikatan dari satu material ke material yang lain, yaitu sebuah perekat untuk substrat, karena berbagai interaksi yang mungkin. Perekat memiliki struktur molekul diubah di zona adhesi karena ikatan ke permukaan seperti pengujian FRP.



### Core Drill Sampling Test

Pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan sample beton untuk penilaian estimasi kuat tekannya pada struktur suatu bangunan. Persyaratan pengujian berdasarkan SNI 2492-2018.



### Soil Investigation

Pengujian yang berhubungan dengan mekanika tanah, teknik pondasi dan struktur tanah yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik tanah. Soil test dapat dikerjakan dengan beberapa metode yaitu Sondir, Hand Bor. Drilling, SPT, UDS Sampling, DCP, Sand Cone, Test pit dan Vane Shear Test.



### Steel Tensile Strength Test

Pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan regangan maksimum yang bisa ditahan oleh sebuah bahan ketika diregangkan atau ditarik, sebelum bahan tersebut patah. Kekuatan tarik adalah kebalikan dari kekuatan tekan, dan nilainya bisa berbeda.



## Structural Loading Test



Tujuan uji pembebanan / Loading Test / Structural Loading Test adalah untuk mengetahui apakah bagian struktur (yang diuji) masih kuat menahan beban kerja (working load) yang membebaninya atau tidak.

Pada saat pengujian struktur diamati apakah perilakunya masih memenuhi kriteria peraturan bangunan yang berlaku atau tidak, hasil dari uji ini dapat menjadi salah satu indikasi apakah struktur masih aman atau tidak bagi penggunaannya.

## Dynamic & Static Test



Pengujian beban yang direkomendasikan oleh AASHTO (2000) dimaksudkan untuk mengevaluasi pengujian beban pada jembatan yang adalah untuk mengevaluasi respon struktural jembatan tanpa menyebabkan kerusakan. Pada saat pengujian, jembatan harus dipastikan dalam keadaan sehat dan layak untuk diuji. Oleh karena itu, sebelum dilaksanakan pengujian perlu untuk dilakukan survey detail pada jembatan.

## Survei dan Pemetaan

Ini diperlukan sebagai indikasi awal ada atau tidaknya kerusakan, dimana hal-hal yang menunjukkan kemungkinan adanya kerusakan seperti adanya keretakan, lendutan, korosi dan yang lainnya, lalu diidentifikasi untuk di lakukan tindakan selanjutnya.

Jenis pengujian Survei dan Pemetaan :



### Theodolite

Pengukuran yang dilakukan untuk menentukan kemiringan bangunan sesuai keadaan sebenarnya, dengan cara menentukan tinggi tanah terhadap sudut mendatar dan sudut tegak.



### Global Positioning System (GPS)

Pengukuran yang dilakukan untuk menentukan titik koordinat suatu lokasi dengan menggunakan satelit dalam mengakuisisi datanya.



### Waterpass

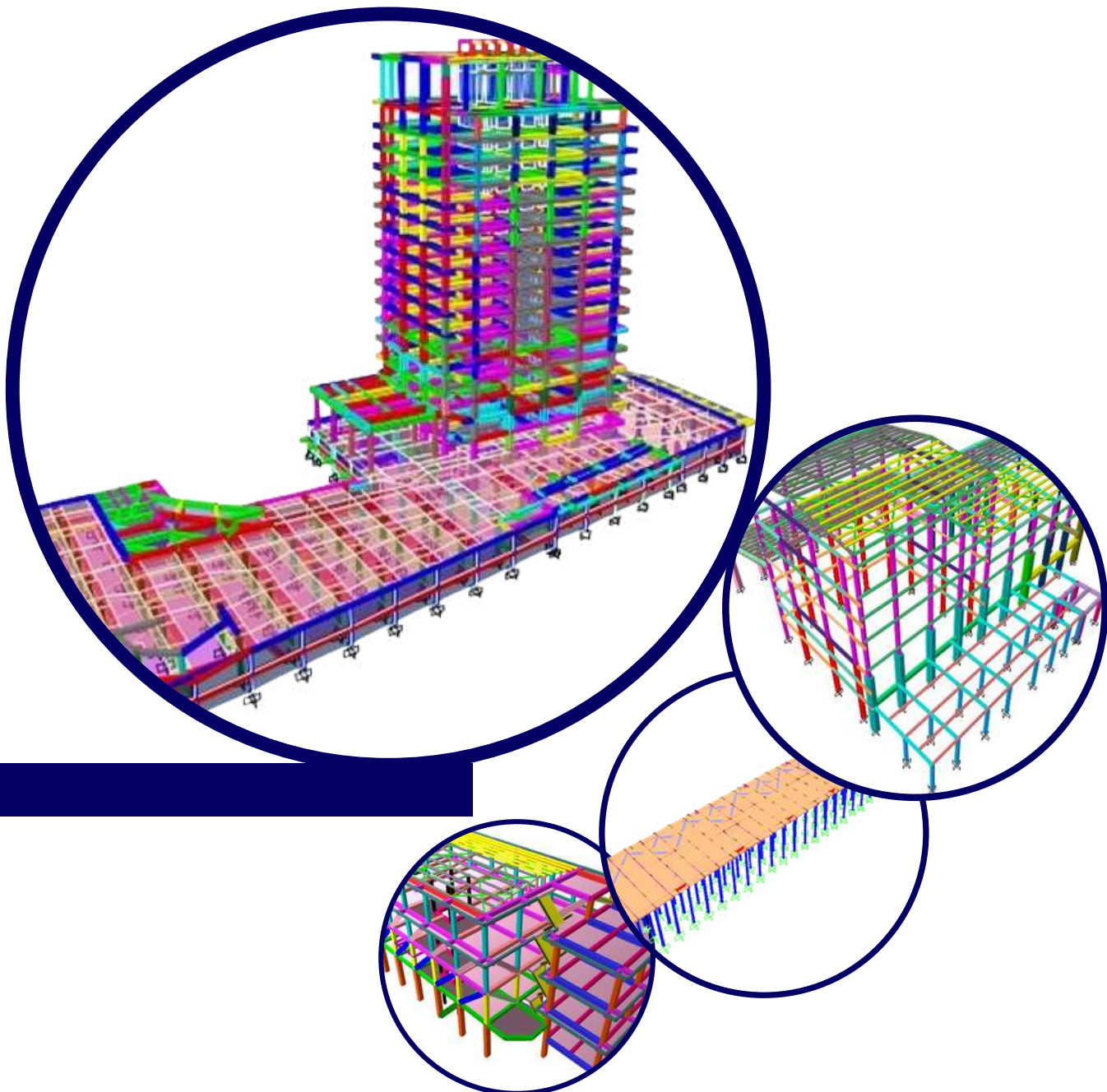
Pengukuran yang dilakukan untuk mengukur suatu benda ataupun garis apakah sudah dalam kondisi rata baik secara vertikal maupun horizontal.

## Analisis Desain dan Re-desain Struktur Bangunan

Dalam kegiatan pembangunan suatu konstruksi diperlukan beberapa tahapan yang meliputi proses perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan berkala. Bangunan mungkin dapat mengalami kerusakan saat pembangunan, selama penggunaan, maupun akibat bencana (kebakaran, gempa atau bencana lainnya). Sehingga dibutuhkan penanganan yang tepat dengan metode pemeriksaan yang komprehensif untuk menghasilkan solusi yang tepat guna, tepat mutu dan tepat biaya.

### Manfaat

Dengan dilakukannya Analisis Struktur dapat diketahui kondisi aktual struktur pada saat ini, serta upaya perbaikan dan perkuatan bila diperlukan guna memenuhi persyaratan standar yang berlaku agar bangunan menjadi optimal baik secara fungsi, estetika dan keamanan.



## LEGALITAS



### ALAMAT KANTOR

Jl. Gegerkalong Hilir No. 175 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Bandung (40151)



### KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Nomor : 73/DP/VI/2016



### NOMOR INDUK BERUSAHA

Nomor : 0213010150695



### KEANGGOTAAN PERSATUAN KONSULTAN INDONESIA (PERKINDO)

Nomor : 013/KTA-JABAR/VII/2008



### AKTE PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Notaris : Irene Ratnaningsih Handoko, S. H.

No : 5

Pengesahan : SK. Menkeh RI

No : C-10.HT.03.02-Th.1997



### AKTE PERUBAHAN TERAKHIR

Notaris : Risdiyani Tandi, SH.

No : 66

Pengesahan : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

No : AHU-AH.01.09.0247094 Tahun 2024



### PERPAJAKAN

SKT : PEM-00356/WPJ.09/KP.0103/2013

SPPKP : S-239PKP/WPJ.09/KP.0103/2021

NPWP : 01.935.934.8-428.000



### SERTIFIKAT BADAN USAHA

**Jasa Arsitektur Gedung Hunian dan Non Hunian :**

021301015069500040002 (AR001)

**Jasa Arsitektur Lainnya :** 021301015069500010003 (AR002)

**Jasa Desain Interior Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil :**

021301015069500040003 (AR003)

**Jasa Rekayasa Konstruksi Gedung Hunian dan Non Hunian :**

021301015069500040001 (RK001)

**Jasa Rekayasa Mekanikal Dalam Bangunan :**

021301015069500050001 (RK004)



### LAPORAN KEUANGAN 3 TAHUN TERAKHIR

SPPT 2020 : 51348401231230021103


SPPT 2021 : 62348405528221030202

SPPT 2022 : 82348406552231028031

SPPT 2023 : 55348406559241029532



### AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS



**NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
IRENE RATNANINGSIH HANDOKO, S.H.**

SK. MENKHEK RI. NO. C10HT03.00-TH.1997 Tg. 21-2-1997  
JL. DIPONEGORO No. 52 Telp. (022) 773688 - 706066  
BANDUNG

---

TURUNAN / SUKONNEKRIK0661

---

AKTA: PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
"P.T. BINANUSA PRACETAK REKAYASA"

---

TANGGAL: 13 Nopember 1999      NOMOR: 5-

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
"P.T. BINANUSA PRACETAK REKAYASA"  
Nomor : 5.


ts/12.

Pada hari ini, Sabtu, tanggal tiga belas Nopember -----  
seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (13-11-1999),  
- hadir dihadapan saya, Irene Ratnangsih Handoko, -----  
Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh -----  
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut -----  
pada bagian akhir akta ini. -----

1. Nyonya Raden HENNYATI, lahir di Jakarta, pada -----  
tanggal tujuh Maret seribu sembilan lima puluh -----  
empat (7-3-1954), swasta, bertempat tinggal di -----  
Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawi, -----  
Kelurahan Pondok Dasu, Jalan Dasu Awi Blok A4 -----  
nomor 15, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
09.5407.470354.0504, Warga Negara Indonesia, -----

2. Nyonya LIA ROSTINI, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, ---  
pada tanggal tiga Maret seribu sembilan ratus lima ----  
puluh delapan (3-3-1958), swasta, bertempat tinggal ----  
di Kotamadya Bandung, Kecamatan Sukasari, Kelurahan ----  
Sarijadi, Cijerokso nomor 67, Rukun Tetangga 07, ----  
Rukun Warga 01, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----  
Nomor 1050014303583002, Warga Negara Indonesia, dan ----

3. Nyonya MELYANI KUSMIHADI, lahir di Bandung, pada ----  
tanggal sebelas Oktober seribu sembilan ratus lima ----  
puluh lima (11-10-1955), swasta, bertempat tinggal ----  
di Kotamadya Bandung, Kecamatan Lengkong, Kelurahan ----  
Turangga, Jalan Hasan Saputra III nomor 6, ----  
Rukun Tetangga dan Rukun Warga 002, pemegang Kartu ----



Tanda Penduduk Nomor 1050115110550001, -----  
Warga Negara Indonesia, dan -----

4. Nona EVELINA ENDANG NURJAMAN, lahir di Bandung, pada -----  
tanggal dua puluh tujuh Setepeteaber seribu sembilan -----  
ratus tujuh puluh delapan (17-9-1978), swasta, -----  
bertempat tinggal di Kotamadya Bandung, Kecamatan -----  
Coblong, Kelurahan Dago, Jalan Sangkuriang D-3, -----  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk Nomor 1050062709790005, -----  
Warga Negara Indonesia. -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.  
- Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan -----  
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah -----  
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu -----  
perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana -----  
yang teraumat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya -----  
cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :-

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama -----  
"P.T. BINANUSA PRACETAK REKAYASA"  
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----  
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di -----  
Kotamadya Bandung.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di -----  
tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah -----  
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh -----  
Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak terbatas.---

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha -----  
di bidang : -----  
a. Jasa, -----  
b. Industri, dan -----  
c. Keagenan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -----  
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----  
sebagai berikut : -----  
a. Menjalankan usaha jasa konsultan, diantaranya : -----  
- survey, perencanaan, pengawasan dan pengelolaan -----  
dalam bidang pembuatan pemukiman transmigrasi, -----  
gedung dan pabrik, jalan, jembatan, sungai, -----  
rawa, irigasi dan bangunan air, teknik sipil -----  
serta kawasan industri dan pariwisata, -----  
- perencanaan, pengawasan dan manajemen dalam -----  
bidang prasarana dan sarana transportasi darat, -----  
laut, udara, jalan raya, sungai, penyebrangan, -----  
energi, perlistrikan, komunikasi dan industri, -----  
- studi perencanaan sistim informasi dan komputer -----  
(termasuk sistim informasi geografi), perencanaan -----  
pendidikan, latihan tenaga kerja dan alih -----  
teknologi, perencanaan operasi, distribusi -----  
dan produksi, -----  
- survey perencanaan, pengawasan dan manajemen -----  
dalam bidang penyelidikan geologi dan tanah, -----  
pemeriksaan foto udara dan penginderaan jauh -----  
serta pemetaan perencanaan wilayah dan kota, -----

- penneembangan teknologi pertanian, kebutanan, -----  
lingkungan hidup dan tata ruang wilayah, -----
- konsultan industri rekayasa bangunan, -----
- konsultan keagenan produksi industri rekayasa, -----
- konsultan kalibrasi, -----
- konsultan bidang peningiatan kemaanpuan sumber -----  
daya manusia, -----
- kecuai jasa bidang hukum dan pajak ; -----
- b. Menjalankan usaha industri rekayasa bangunan ; -----
- c. Menjalankan usaha keagenan produk industri -----  
rekayasa, kecuai agen perjalanan ; dan -----
- d. Menjalankan usaha perdagangan umum, baik barang -----  
barang produk dalam negeri maupun produk luar negeri.

H O D D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 300.000.000,--  
(tiga ratus juta rupiah), terbagi atas 300 (tiga -----  
ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal -----  
Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah dipesatkan oleh -----  
para pendiri, yaitu :
  - a. penghadap nyonya Raden -----  
Hennywati, sebanyak 20 (dua -----  
puluh) saham atau sebesar -----  
(dua puluh juta rupiah), -----  
Rp. 20.000.000,--
  - b. penghadap nyonya Lis Rostini, -----  
Sarjana Hukum, sebanyak 20 -----  
(dua puluh) saham atau -----  
sebesar -----  
(dua puluh juta rupiah), -----  
Rp. 20.000.000,--

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -----  
saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -----  
hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum -----  
Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan -----  
hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik -----  
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama -----  
sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara -----  
mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama --

- c. penghadap nyonya Mellyani -----  
Kunihadi, sebanyak 20 (dua -----  
puluh) saham atau sebesar -----  
(dua puluh juta rupiah), dan -----  
Rp. 20.000.000,--
- d. penghadap nona Evelina Endang -----  
Nurjaman, sebanyak 20 (dua -----  
puluh) saham atau sebesar -----  
(dua puluh juta rupiah), -----  
Rp. 20.000.000,--
- jumlah 80 (delapan puluh) -----  
saham atau sebesar -----  
(delapan puluh juta rupiah). -----  
Rp. 80.000.000,--

3. 50 % (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap -----  
saham yang telah dipesatkan tersebut diatas, atau -----  
seluruhnya berjumlah Rp. 40.000.000,-- (empat puluh -----  
juta rupiah), telah disetor penuh dengan uang tunai -----  
kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat -----  
penanda-tanganan akta pendirian ini, sedangkan sisanya -----  
yaitu sebanyak 50% (lima puluh persen) dari setiap -----  
nilai nominal saham yang telah dipesatkan tersebut -----  
atau seluruhnya berjumlah 40.000.000,-- (empat puluh -----  
juta rupiah) lagi akan disetor penuh dengan uang -----  
kepada Perseroan selambatnya pada tanggal akta -----  
pendirian ini memperoleh pengesahan dari Menteri -----  
Kehakiman Republik Indonesia.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----  
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, -----  
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----  
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----  
Pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----  
menggambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan -----

- dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu seajalah yang -----  
berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum -----  
atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum -----  
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut -----  
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk -----  
saham itu ditangguhkan.
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk -----  
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang -----  
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----  
serta peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap -----  
saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -----  
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----  
dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham ;
  - b. Nomor surat saham ;
  - c. Tanggal pengeluaian surat saham ;
  - d. Nilai nominal saham .
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham ;
  - b. Nomor surat kolektif saham ;
  - c. Tanggal pengeluaian surat kolektif saham ;

d. Nilai nominal saham ; -----  
e. Jumlah saham. -----  
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-  
tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. -----  
PENGANTIAN SURAT SAHAM  
Pasal 7  
1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai  
lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan,  
Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.  
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1  
kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita  
acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham berikutnya.  
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan  
mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan  
surat saham pengganti setelah menurut pendapat  
Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan  
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk  
tiap peristiwa yang khusus.  
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan,  
maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap  
Perseroan.  
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham  
itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.  
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis, juga  
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.  
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS  
Pasal 8  
1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang  
Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----  
a. nama dan alamat para pemegang saham ; -----  
b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham -----  
atau surat kolektif saham, yang dimiliki para  
pemegang saham ; -----  
c. jumlah yang disetor atas setiap saham ; -----  
d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang  
memunyai hak gadai atas saham dan tanggal -----  
perolehan hak gadai tersebut ; -----  
e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain -----  
selain uang ; dan -----  
f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----  
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai -----  
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris -----  
berserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada -----  
Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----  
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan -----  
tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. --  
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala -----  
panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham -----  
adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham -----  
yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----  
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara -----  
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----  
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang -----  
Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor -----  
Perseroan. -----  
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM  
Pasal 9  
1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -----

pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang -----  
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil -----  
mereka yang sah. -----  
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1  
atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.  
3. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus  
menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada -----  
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta -----  
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada -----  
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----  
4. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham  
yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)  
hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan  
jumlah saham yang dimiliki masing-masing.  
5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang  
ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dibeli  
dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam  
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran  
dilakukan.  
6. Dalam hal perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya  
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, pemegang  
saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada  
karyawan mendahului penawaran kepada orang lain  
dengan harga dan persyaratan yang sama.  
7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana  
dimaksud dalam ayat 3 berhak menarik kembali  
penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu  
yang dimaksud dalam ayat 4.  
8. Kewajiban menawarkan saham kepada pemegang saham  
lain hanya dapat dilakukan satu kali. -----

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila --  
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. --  
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak -----  
atas saham tidak diperkenankan. -----  
11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab -----  
lain saham tidak lagi menjadi milik warganegara -----  
Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila -----  
seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan -----  
Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, --  
orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk -----  
menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada -----  
seorang warganegara Indonesia atau suatu badan hukum --  
Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar. -----  
12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini -----  
belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan -----  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu -----  
dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen -----  
atas saham itu ditunda. -----  
D I R E K S I  
Pasal 10  
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi -----  
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, -----  
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka -----  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur -----  
Utama. -----  
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah -----  
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan -----  
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----  
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum -----



Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu -----  
5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat -----  
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya -----  
sewaktu-waktu. -----

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau -----  
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi -----  
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) -----  
hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan -----  
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi -----  
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. -----

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan -----  
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu -----  
30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan -----  
tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk -----  
sementara Perseroan diurus oleh Komisaris. -----

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri, -----  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----  
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan -----  
seturangannya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----  
pengunduran dirinya. -----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----  
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----  
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ; -----  
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -----  
yang berlaku ; -----

d. meninggal dunia ; -----  
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----  
Pasal 11 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan -----  
tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai -----  
maksud dan tujuannya. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan -----  
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan -----  
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di -----  
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----  
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -----  
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala -----  
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun -----  
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----  
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -----  
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) ; -----  
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada -----  
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ; -----  
harus dengan persetujuan Komisaris Utama. -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak -----  
atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian -----  
besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku -----  
baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi -----  
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu -----  
sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para -----  
Pemegang Saham yang memiliki 3/4 (tiga perempat) -----

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -----  
yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 -----  
(tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara -----  
yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan -----  
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta -----  
kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 -----  
wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian -----  
berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan -----  
Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung -----  
sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. -----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak -----  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----  
Perseroan. -----  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana -----  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -----  
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -----  
serta mewakili Perseroan. -----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula -----  
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau -----  
kusaanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang -----  
diatur dalam surat kuasa. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi -----  
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan -----  
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----  
dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -----  
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang -----

anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh -----  
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan -----  
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan -----  
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal -----  
ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. -----

RAPAT DIREKSI -----  
Pasal 12 -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana -----  
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota -----  
Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang -----  
atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan -----  
tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang -----  
bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian -----  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----  
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut -----  
ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan -----  
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----  
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----  
mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) -----  
hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitun- -----  
kan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----  
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan -----  
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -----  
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan -----  
dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan -----

berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ....

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan-hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. ....

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. ....

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. ....

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ....

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. ....

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. ....

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain

dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ....

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ....

12. - Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ....

K O M I S A R I S

Pasal 13

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ....

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ....

3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ....

4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat

Umum Pemegang Saham. ....

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. ....

6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ....

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. meninggal dunia ;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ....

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 14

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. ....

2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan yang

kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ....

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. ....

4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ....

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. ....

6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. ....

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain. ....

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seoranganpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 15

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal

panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Komisaris hadir, atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang,

maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta amandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

TAHUN BUKU

Pasal 16

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan

dimulai pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini.

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

- Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.
- Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
- Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
- Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah

hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19

- Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
- Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

- Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan

melakukan kegiatan usaha.

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan.

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

Jain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat dipimpin oleh seorang Direksi lainnya, dalam hal anggota Direksi lainnya tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

3. Pemandatangan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta notaris.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

- Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 22

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat la. tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat lb. harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan (tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat).

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama.

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, Korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang Wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan

perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGUNYAN LABA

Pasal 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya, Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu

tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNYAN DANA CADANGAN

Pasal 24

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Pengubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Sahas tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korus yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui paling sedikit berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor

Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 26

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan dan pengambil alihan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Sahas yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahas.

PENYUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penyubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Sahas yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Sahas atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Sahas atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Sahas atau penetapan Pengadilan.

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikesudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Sahas dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur

dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Sahas yang akan memutuskan.

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Koalisiaris, telah diangkat sebagai :

Direktor Utama : Tuan Antonius Samu Trihadi, lahir di Kudus, pada tanggal dua belas Februari seribu sembilan ratus empat puluh tiga (12-2-1943), pegawai swasta, bertempat tinggal di Kotamadya Bandung, Kecamatan Lengkong, Kelurahan Turangga, Jalan Hasan Saputra 4 nomor 2-B, Rukun Tetangga dan Rukun Warga 002, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 10.5011.120243.0002, Warga Negara Indonesia,

Direktor-Direktur : 1. Tuan Insiyur Hobby Parhonip, lahir di Sumatra Utara, pada tanggal lima Maret seribu sembilan ratus enam puluh delapan (5-3-1968), pegawai swasta, bertempat tinggal di Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kelurahan

Ditusaaur, Jalan Nyengseret --  
 nomor 73, Rukun Tetangga 02, --  
 Rukun Warga 03, peesegang --  
 Kartu Tanda Penduduk Nomor --  
 196803050427/0302037, Warga --  
 Negara Indonesia, -----

2. Tuan Insinyur Prijasabada, --  
 lahir di Jakarta, pada -----  
 tanggal empat belas Oktober --  
 seribu sembilan ratus enam --  
 puluh tiga (14-10-1964), -----  
 swasta, bertempat tinggal --  
 di Kotamedya Jakarta Timur, --  
 Kecamatan Cakung, Kelurahan --  
 Jatinegara, Kompleks PLN --  
 Klender, Rukun Tetangga 006, --  
 Rukun Warga 002, peesegang --  
 Kartu Tanda Penduduk Nomor --  
 09.5403.141063.0124, Warga --  
 Negara Indonesia, -----

Komisaris Utama : penghadap nyonya Raden -----  
 Hennywati, -----

Komisaris-komisaris : 1. penghadap nyonya Lia -----  
 Rostini, Garjana Hukum, -----  
 2. penghadap nyonya Meliyani -----  
 Kusahadi, dan -----  
 3. penghadap nona Evelina -----  
 Endang Nurjaman. -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris -----  
 tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----

berangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum -----  
 Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah -----  
 akta pendirian ini mendapat pengesahan dari Menteri -----  
 Kehakiman Republik Indonesia. -----

II. Tuan Insinyur Hari Nugraha Nurjaman tersebut dan -----  
 nyonya Tien Soeantri, pegawai kantor notaris, -----  
 bertempat tinggal di Bandung, Kompleks Griya -----  
 Bandung Atri 1 Blok E nomor 89, Bojongsong, baik -----  
 bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -----  
 untuk wewenang kekuasaan ini kepada orang lain -----  
 dikuasakan untuk meohon pengesahan atas Anggaran -----  
 Dasar ini dari Instansi yang berwenang dan untuk -----  
 membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk -----  
 yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----  
 memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan -----  
 dan amandatanganinya semua permohonan dan dokumen -----  
 lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----  
 melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

DEKIMBALAH AKTA INI -----


- Dibuat dan direvisikan di Bandung, pada hari dan -----  
 tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini -----  
 dengan dihadiri oleh : -----  
 1. Nyonya Dedah Randeh Sukarna, dan -----  
 2. Nyonya Ai Karwati, -----  
 keduanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal -----  
 berturut-turut di Bandung, Jalan Kembang Selatan nomor 3, --  
 dan Jalan Pagarsih, Gang Madrasah Rukun Tetangga 07, -----  
 Rukun Warga 01, sebagai saksi-saksi. -----

- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -----  
 kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda -----

tanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi -----  
 saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilaksanakan dengan tujuh coretan dan empat gantian -----  
 tanpa tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----  
 Diberikan sebagai turunan. -----



DEPARTEMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL  
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 0-137/PT.01.01.701.2000  
 MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Permohonan tanggal 22 April 2000 Nomor 12/200/PT/IV/  
 2000 dari Notaris Trens Ratumaningih Handoko, di yang kami  
 terima tanggal 27 April 2000.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Perseroan  
 yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang  
 ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku  
 sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas  
 Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas  
 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran  
 Negara Nomor 3587);  
 2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-  
 PR.03.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan  
 dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
 PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :  
 PT. BINANUSA PONDOK BUKITARA  
 berdasarkan di Kotamedya Bandung, sesuai dengan Akta  
 Pendirian Perseroan tanggal 22 April 2000 yang dibuat oleh  
 Notaris Trens Ratumaningih Handoko, SE berdasarkan di bag-  
 ian di atas.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia  
 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 14 Juli 2000

A.A. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 ANASUBRATA, S.H., LL.M.  
 133350117

AKTA PERUBAHAN TERAKHIR



**NOTARIS**  
dan  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**RISDIYANI TANDI, SH.**

SK. TGL. 18 MARET 2002 No. C-243/JT.03.01 - TA.2002  
SK. TGL. 18 DESEMBER 2006 No. 313-XVII TA. 2006

**KANTOR : JALAN Dr. RAJIMAN NO. 2 - BANDUNG**  
**TELP. 4254790 - 4209797 WA. 08 111 111 2878**

---

**REKORDEK : SALINAN REKORDEK**

---

AKTA : **RAJAP UMUM PEMEGANG BUKAN LUAR NEARA**  
**PERUSAHAAN TERBATAS PT. BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA**

TANGGAL : **23 AGUSTUS 2024** NOMOR : **8/24**

DIBERIKAN UNTUK :

**RAJAP UMUM PEMEGANG BUKAN LUAR NEARA**  
**PERUSAHAAN TERBATAS PT. BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA**

Nomor : 8/24

Pada hari ini, jam'01, tanggal 23-08-2024 (dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh empat), pukul 13.00 WIB (tiga belas Nkru Indonesia Barat),

Daya, **RISDIYANI TANDI**, Barjans Nukus, Notaris di Kota Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebatkan pada bagian akhir dari akta ini :

Atas permintaan dari Direksi Perusahaan Terbatas yang akan disebutkan dibawah ini telah berede di Kantor saya, Notaris, Jalan Dokter Rajiman nomor 2, Bandung,

Untuk membuat suatu Berita Acara dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Luar Biasa Besangyang Nuhah dalam Perusahaan Terbatas **PT. BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA**, berkedudukan di Kota Bandung, yang didirikan dengan akta tertanggal 13-11-1994 (tiga belas Noverber seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) nomor 5, yang dibuat dihadapan **TANDI SATHARINDU HARDOHO**, Barjans Nukus, Notaris di Kota Bandung, yang kemudian diubah dengan akta tertanggal 13-04-2004 (tiga puluh tiga Apustus tahun dua ribu empat) nomor 6, yang



dibuat oleh **HUNNY WIANTI KADENGA**, Barjans Nukus, Notaris di Kota Bandung, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 27-01-2005 (dua puluh tujuh Januari tahun dua ribu lima) nomor C-02278/ST.01.04/TH.2005, yang kemudian Anggaran Dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain sebagai berikut :

a. Akta tertanggal 22-01-2010 (dua puluh dua Januari tahun dua ribu sepuluh) nomor 2, yang Perubahan Anggaran Dasarnya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 30-04-2011 (tiga puluh September tahun dua ribu sebelas) nomor AHU-47712.AH.01.02.Tahun 2011 ;

b. Akta tertanggal 10-06-2014 (sepuluh Juni tahun dua ribu empat belas) nomor 2, yang Perubahan Data Perusahaannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan suratnya tanggal 24-04-2014 (dua puluh empat Juni tahun dua ribu empat belas) nomor AHU-15551.40.22.2014 ;

c. Akta tertanggal 01-11-2016 (satu Noverber tahun dua ribu enam belas) nomor 01, yang Perubahan Anggaran Dasarnya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 24-11-2016 (dua puluh empat Noverber tahun dua ribu enam belas) nomor AHU-0222235.AH.01.02.Tahun 2016 ;

d. Akta tertanggal 08-02-2019 (delapan Februari tahun dua ribu sembilan belas) nomor 01, yang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan suratnya tanggal 02-03-2019 (dua Maret tahun dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0127613 ;

e. Akta tertanggal 16-09-2021 (enam belas September tahun dua ribu dua puluh satu) nomor 01, yang Perubahan Anggaran Dasarnya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 08-10-2021 (delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-0064980.AH.01.02.Tahun 2021, dan



Perubahan Data Pemasokannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan suratnya masing-masing berturut-turut tertanggal 06-10-2021 (enam Oktober tahun dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.01-0437436 ;

8. Akta tertanggal 12-11-2021 (dua belas November tahun dua ribu dua puluh satu) nomor 02, yang Perubahan Data Pemasokannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan suratnya tanggal 13-11-2021 (tiga belas November tahun dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.01-0473244 ; yang kesemuanya telah dibuat dihadapan HANNY WIANNI WARMANA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung.

9. Adapun perubahan Anggaran Dasar dan susunan pemegang saham dan susunan pengurusnya yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 18-09-2021 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tiga) nomor 46, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang Perubahan Anggaran Dasarnya telah

perseorlah persetajuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 20-09-2021 (dua puluh September tahun dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-00056878.AH.01.01.Tahun 2021, dan Perubahan Data Pemasokannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan suratnya tanggal 20-09-2021 (dua puluh September tahun dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.01-0145204, serta telah dimuatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22-09-2021 (dua puluh dua September tahun dua ribu dua puluh tiga) nomor 076, Tambahan Berita Negara nomor 029302 Tahun 2021 (desember dua puluh tiga) ; (selanjutnya disebut Perseoran).

Pada Rapat telah hadir dan oleh karena itu telah menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang disebutkan dibawah ini :

1. Tuan **DANDU YUDHA KESUMA**, lahir di Padang, pada tanggal 22-09-1985 (dua puluh tiga September tahun sembilan ratus delapan puluh

lima), status pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Kampung Cibadak, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisrusu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan 1273012309850002, Warga Negara Indonesia, sekarang sedang berada di Kota Bandung ;

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai :

a. Direktur Utama perseoran ;

b. pemegang dan pemilik 100 (seratus) saham dalam perseoran dan berhak untuk mengoleksikan 100 (seratus) suara.

2. Tuan **ISMAHATI ANGLIS**, lahir di Bandung, pada tanggal 17-07-1986 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Cijerukane nomor 47, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sokasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan 1273011707860002, Warga Negara Indonesia ;

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai :

a. Direktur perseoran ;

b. pemegang dan pemilik 510 (lima ratus sepuluh) saham dalam perseoran dan berhak untuk mengoleksikan 510 (lima ratus sepuluh) suara.

3. Tuan **RAJUAL SUPRI**, lahir di Lampung, pada tanggal 02-10-1979 (dua Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), status pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Cirebon, Jalan Kajiya Bakti, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 016, Kelurahan Cipapasah, Kecamatan Cirebon Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan 127100210790004, Warga Negara Indonesia, sekarang sedang berada di Kota Bandung ;

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai :

a. Direktur perseoran ;

b. pemegang dan pemilik 100 (seratus) saham dalam perseoran dan berhak untuk mengoleksikan 100 (seratus) suara.

4. Nyonya **EMILIA ANILIA ILMUPUTRI**, lahir di Bandung, pada tanggal 06-04-1988 (delapan April seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), status pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan

Surat Kado IV nomor 13, Rumah Tetangga 506, .....  
 Rumah Warga 001, Kelurahan Sarijadi, .....  
 Kecamatan Sukorejo, pemegang Kartu Tanda .....  
 Penduduk Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor .....  
 Induk Kependudukan 3273014804880002, Warga .....  
 Negara Indonesia ; .....  
 Menurut keterangannya dalam hal ini .....  
 bertindak sebagai : .....  
 a. Komisaris perseroan ; .....  
 b. pemegang dan pemilik 290 (duaratus .....  
 sembilanpuluh) saham dalam perseroan .....  
 dan berhak untuk mengeluarkan 290 (dua .....  
 ratus sembilanpuluh) saham. ....

5. Nyonya **LIA BOSTINI**, Sarjana Hukum, lahir di .....  
 Bandung, pada tanggal 03-03-1954 (tiga Maret .....  
 seribu sembilanratus lima puluh delapan), .....  
 status pekerjaan swasta, bertempat tinggal .....  
 di Kota Bandung, Jalan Cijerokabo nomor 47, .....  
 Rumah Tetangga 007, Rumah Warga 001, .....  
 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukorejo, .....  
 pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa .....  
 Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan .....  
 3273014803580003, Warga Negara Indonesia ; .....  
 Yang dalam hal ini hadir atas undangan .....  
 rapat. ....

Para penghadap telah dikenal oleh saya, .....  
 Notaris. ....

penghadap Tuan **PAMU YUDHA KESUMA**, tersebut .....  
 diatas, dalam kedudukannya sebagai **DIREKTUR** .....  
**UTAMA** Perseroan tersebut tepat selaku Ketua .....  
 Rapat, pada pukul 13,30 WIB (tiga belas lewat .....  
 sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). ....  
 Ketua Rapat memrangkai terlebih dahulu .....  
 sebagai berikut : .....  
 - bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan .....  
 diwakili oleh 1.000 (seribu) saham yang .....  
 merupakan seluruh saham-saham yang telah .....  
 dikelompokkan oleh Perseroan tersebut dengan hari .....  
 ini, karenanya berdasarkan ketentuan dalam .....  
 Anggaran Dasar Perseroan rapat ini adalah .....  
 sah susunannya dan berhak untuk mengambil .....  
 segala keputusannya yang mengikat. ....

- bahwa Rapat tersebut tersebut diatas, mengetahui .....  
 betul pemilihan saham-saham dari para .....  
 pemegang saham dari para pemegang saham .....  
 tersebut diatas dan tidak perlu dijelaskan .....  
 lebih lanjut dalam akta ini. ....

- bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan .....  
 kepada saya, Notaris, oleh karena belum .....  
 dibayar, akan tetapi Ketua Rapat menjamin .....  
 bahwa pemilihan dari saham-saham tersebut .....  
 adalah benar sebagaimana tersebut diatas ; .....  
 oleh karena acara rapat ini telah diketahui .....  
 oleh para pemegang saham, maka rapat dengan

ini memutuskan untuk : .....

I. Menyetujui akomodasi penjualan saham milik .....  
 penghadap Tuan **PAMU YUDHA KESUMA** sebanyak .....  
 100 (seratus) saham dengan nilai nominal .....  
 atau sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus .....  
 juta Rupiah) kepada penghadap Nyonya **LIA** .....  
**BOSTINI**, Sarjana Hukum tersebut diatas. ....

II. Penjualan atas saham-saham tersebut akan .....  
 dilakukan dengan akta-akta tersendiri .....  
 dan setelah dilakukan penjualan atas .....  
 saham-saham tersebut, sehingga dengan .....  
 demikian urusan kepemilikan saham Perseroan .....  
 Terbatas **PT. BINANUSA FRACKTAK DAN SEKATASA** .....  
 menjadi sebagai berikut : .....

- penghadap Tuan **IKHWANU AMBIL**, sejumlah .....  
 510 (limaratus sepuluh) saham dengan nilai .....  
 nominal atau sebesar Rp. 510.000.000,00 .....  
 (limaratus sepuluh juta Rupiah) ; .....

- penghadap Tuan **HAJRAL SUFRI**, sejumlah 100 .....  
 (seratus) saham dengan nilai nominal atau .....  
 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta .....  
 Rupiah) ; .....

- penghadap Nyonya **CEITTA AMELIA LIMIPUTRI**, .....  
 sejumlah 290 (duaratus sembilanpuluh) .....  
 saham dengan nilai nominal atau sebesar .....  
 Rp. 290.000.000,00 (duaratus sembilan .....  
 puluh juta Rupiah) ; .....

- penghadap Nyonya **LIA BOSTINI**, Sarjana .....  
 Hukum, sejumlah 100 (seratus) saham .....  
 dengan nilai nominal atau sebesar .....  
 Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ; .....  
 sehingga seluruhnya sebesar 1.000 (seribu) .....  
 saham dengan nilai nominal seluruhnya .....  
 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar .....  
 Rupiah). ....

III. Memerintahkan dengan hormat atas permohonan .....  
 sendiri penghadap Tuan **PAMU YUDHA KESUMA** .....  
 tersebut diatas, dari jabatannya selaku .....  
**DIREKTUR UTAMA** perseroan ; .....

IV. Memerintahkan pengesahan, pemberitaan serta .....  
 pelaksanaan langsung jawab sepenuhnya kepada .....  
 penghadap Tuan **PAMU YUDHA KESUMA** tersebut .....  
 diatas, untuk segala tindakan yang telah .....  
 dilakukan olehnya bagi perseroan selama .....  
 masa jabatannya yang telah lampau sepanjang .....  
 tindakan-tindakan tersebut termasuk dari .....  
 pernyataan dan berita perusahaan .....  
 perseroan. ....

V. Mengangkat para penghadap Tuan **IKHWANU** .....  
**AMBIL** dan Nyonya **LIA BOSTINI**, Sarjana .....  
 Hukum tersebut diatas, sebagai-wakil .....  
 berturut-turut selaku **DIREKTUR UTAMA** dan .....  
**KOMISARIS UTAMA** perseroan. ....

VI. Sehingga sah sejak tanggal hari ini .....

.....  
 susunan pengurus perusahaan untuk  
 selanjutnya menjadi sebagai berikut :  
**DIREKSI**  
 Direktur Utama : penghadap Tuan **IRRAWAN**  
 Direktur : penghadap Tuan **KARNAL**  
**Dewan Komisaris**  
 Komisaris Utama : penghadap Nyonya **LIA**  
 Komisaris : penghadap Nyonya **CEITTA**

VII. Dibaca dan

.....  
 baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri  
 dengan hak untuk membatalkan keputusan ini  
 ini kepada pihak lain, dilaksanakan untuk  
 tujuan persetujuan atas Anggaran Dasar  
 ini dari ketentuan yang berwenang dan untuk  
 membuat perubahan dan/atau tambahan dalam  
 bentuk yang bagaimanapun juga yang  
 diperlukan untuk memperoleh persetujuan  
 tersebut dan untuk mengajukan dan  
 menandatangani semua permohonan dan dokumen  
 lainnya, untuk memilih tempat kedudukan

.....  
 (kemungkinan tujuh puluh tujuh), karyawan  
 notaris, bertempat tinggal di Kota Bandung,  
 Jalan Cikuray Dalam nomor 10, Kecamatan  
 Lengkong, Kelurahan Lingkar Selatan,  
 pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa  
 Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan  
 3273134304770004, Warga Negara Indonesia ;  
 sebagai saksi-saksi.  
 Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris  
 kepada para penghadap dan para saksi, maka  
 pada ketika itu juga para penghadap, para  
 saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta  
 ini. dan juga para penghadap membubuk cap  
 ips jari tangan kamarnya pada akta ini.  
 Dibuat dengan tanpa saksi coretan, gantian  
 maupun tambahan.  
 Minuta akta ini telah ditandatangani dengan  
 sempurna.  
 Diberikan sebagai SALINAN.

.....  
 Dibuat di Kota Bandung,  
  
**HIDIYATI TANDI, S.H.**

.....  
 dan untuk melaksanakan tindakan lain yang  
 mungkin diperjuangkan,  
 Ditetapkan karena itu tidak ada hal-hal lain yang  
 akan dilakukannya, maka Rapat menutup  
 rapat ini pada pukul 13.20 WIB (tiga belas lewat  
 tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat),  
 dari apa yang tersebut diatas, saya, Notaris  
 membuat Berita Acara ini untuk dipergunakan  
 sebagaimana mestinya.  
**DEMIKIAN AKTA INI**  
 Dibuat dan dilaksanakan di Kota Bandung, pada  
 jam, hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut  
 di atas, pada bagian awal akta ini, dengan  
 ditetris oleh :  
 - Nyonya **ASTRY SOVIARTY**, Sarjana Hukum, Register  
 Kantoran, lahir di Bandung, pada tanggal  
 21-11-1982 (dua puluh satu November seribu  
 sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan  
 notaris, bertempat tinggal di Kabupaten  
 Bandung, Tama Kopo Indah Seiatang Misa  
 nomor 47, Kecamatan Margahayu, Desa Sehati,  
 pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa  
 Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan  
 324036611820002, Warga Negara Indonesia,  
 sekarang sedang berada di Kota Bandung ;  
 - Nyonya **WATI FARISAH**, lahir di Bandung,  
 pada tanggal 03-04-1977 (tiga April seribu



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
 J. H.A. Kasusa Sudi Huc, 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
 Telp. (021) 520287 - Haring**

Nomor : AHU-AHU.09-0147304 Kapada Yth.  
 Lampiran : Notaris HIDIYATI TANDI S.H.  
 Perihal : Penetapan Pemberitahuan J. DR. RAHMAT NO. 2  
 Perubahan Data Perseroan KOTA BANDUNG  
 PT BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA

Sesuai dengan data dalam format isian Perubahan yang dilampirkan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris nomor 81, Tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat oleh Notaris HIDIYATI TANDI S.H., berkedudukan di KOTA BANDUNG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, PT BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA, berkedudukan di KOTA BANDUNG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Dibuatkan di Jakarta, Tanggal 02 September 2024.




**J.A. MONTER HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,**

**Catyo Rahadisa Purkari, S.H., LL.M.  
 1969082 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL: 02 September 2024  
 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0185609.AH.01.11.TAMON 2024 TANGGAL 02 September 2024  
 Pemberitahuan ini hanya merupakan informasi, bukan perintah Tata Usaha Negara

### KETERANGAN DOMISILI

  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KELURAHAN : SARIJADI  
KECAMATAN : SUKASARI

No. : 029439 Model XVI

**SURAT KETERANGAN DOMICILI PERUSAHAAN**  
Nomor: 30/DP/SRJD/VI/2016

Lurah Sarijadi bersama ini menerangkan bahwa:

Nama	: Ir.SJAFEI AMRI, Dipl.E.ENG.
No. KTP & TMB	: 3273010904510002, Seumur Hidup
Tempat / Tgl.Lahir	: Tebing Tinggi Deli, 09 April 1951
A g a m a	: Islam
Kewarganegaraan	: WNI
Alamat Rumah & Telepon	: Jl. Cijerokaso No. 67, Kel. Sarijadi Kec. Sukasari Kota Bandung Prov. Jawa Barat 081394906444
Jabatan	: Direktur

Benar mempunyai perusahaan yang berdomisili dalam wilayah Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung dengan keterangan sebagai berikut:


Nama Perusahaan	: PT. BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA
Alamat Kantor	: Jl. Gegerkalong Hilir No. 175 RT 001 RW 001
Telepon Kantor	: 0222003252
Akte Pendirian	: NANNY WIARNI WARMANA, SH. 6 Tanggal 23 Agustus 2004
Bergerak di bidang	: Konsultan
Jumlah Pegawai	: 8 Orang
Jam Kerja	: 09.00 s/d 17.00 WIB


Surat Keterangan ini dikeluarkan kepada yang bersangkutan untuk 1 (satu) Kali keperluan pengurusan Izin Tempat Usaha. Wajib diperbaharui apabila sudah terdapat hal yang tidak sesuai dengan surat ini.

Surat Keterangan Ini tidak berlaku Apabila terjadi pelanggaran Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Daerah Kota Bandung dan atau kekeliruan/kesalahan dalam pembuatannya.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Registrasi:  
Tanggal : 16 Juni 2016  
Nomor : 33 / DP / VI / 2016

Mengetahui,  
CAMAT SUKASARI  
  
**Drs. Avi Sutarsa**  
NIP. 19671107 1990101 1 001

Bandung, 16 Juni 2016  
LURAH SARIJADI  
  
**MUSLIH**  
NIP. 19660101 198603 1 037

## PERPAJAKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I  
KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA  
JALAN TERS. PROF. DR. SUTAMI NO. 2, BANDUNG  
TELEPON 022-2006520, 2004380 FAKSIMILE 022-2009450 SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

### SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK Nomor: S-239PKP/WPJ.09/KP.0103/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. BINANUSA PRACETAK REKAYASA
2. NPWP : 01.935.934.8-428.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 10 April 2013 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Bandung, 8 September 2021  
a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan,

Ade Meccanova



INFO KSWP

**PROFIL WAJIB PAJAK**

NIK / NPWP/PE	0019359348428000
NPWP IS	019359348428000
NAMA WP	BINANUSA PRACETAK REKAYASA
ALAMAT	Jl. GEGERKALONG HILIR - KOTA BANDUNG

**PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA**

Untuk keperluan:  Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid	

## KEANGGOTAAN PERKINDO

  
**PERSATUAN KONSULTAN INDONESIA**  
**PERKINDO**  
*Profesional dalam Berkejasama*

### KARTU TANDA ANGGOTA PERSATUAN KONSULTAN INDONESIA

Nama Perusahaan <i>Company Name</i>	: BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA , PT	No Seri : 0001446.2023 <i>Serial Number</i>
Nama Penanggung Jawab <i>Authorized Name</i>	: IKHWANUL AMRIL	
Alamat Badan Usaha <i>Company Address</i>	: JL. GEGERKALONG HILIR NO. 175, DESA/KELURAHAN SARIJADI KEC. SUKASARI, KOTA BANDUNG - 40151	
Telepon <i>Phone</i>	: 0222003252	
Email	: corporate@binanusa.co.id	
Email <i>Email</i>		

**Nomor Keanggotaan / Membership Number**  
0013.32.11.2023

**STATUS KEANGGOTAAN**  
**PENUH**

Berlaku mulai 08 November 2023 s/d 08 November 2024

Jakarta, 08 November 2023

<b>DEWAN PENGURUS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT</b>  <b>ARA BUDIDARMA RACHMAT, S.E.</b> KETUA	 <b>DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN KONSULTAN INDONESIA</b>  <b>IR. NUNUS NUGROHO, AP., M.M., I.P.U.</b> KETUA UMUM
---	---

## NOMOR INDUK BERUSAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0213010150695

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA
2. Alamat Kantor	: JL. GEGERKALONG HILIR NO. 175, Desa/Kelurahan Sarjadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40151
No. Telepon	: 0222003252
Email	: corporate@binanusa.co.id
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 9 November 2020  
Perubahan ke-4, tanggal: 2 Februari 2023

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## NOMOR INDUK BERUSAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0213010150695

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

**A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	46900 (Pendukung)	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Jl. Gegerkalong Hilir No. 175, Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	46900	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

\* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

**B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	74120 (Pendukung)	Aktivitas Desain Interior	Jl. Gegerkalong Hilir No. 175, Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151  Usaha Mikro berjalan sejak: November 1999	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	43120 (Pendukung)	Penyiapan Lahan	Jl. Gegerkalong Hilir No. 175, Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151  Usaha Mikro berjalan sejak: November 1999	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
3	71102	Aktivitas Keinsinyuran	Jl. Gegerkalong Hilir 175 Kelurahan: Sarijadi	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## NOMOR INDUK BERUSAHA

	dan Konsultasi Teknis YBDI	Kecamatan: Sukasari Kab/Kota: Kota Bandung Provinsi: Jawa Barat, Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151		Sertifikat Standar	Telah Terverifikasi	-
4 71101	Aktivitas Arsitektur	Jl. Gegerkalong Hilir 175 , Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5 71202 (Pendukung)	Jasa Pengujian Laboratorium	Jl. Gegerkalong Hilir No. 175, Desa/Kelurahan Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151  Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2020	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.


1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**SERTIFIKAT KOMPETENSI**  
**DAFTAR PEMILIK SERTIFIKAT KEAHLIAN KOMPETENSI**

No.	Nama	Kompetensi	Jenjang	Masa Berlaku	Asosiasi
1	Ir. Sjafei Amri, Dipl., E. Eng	a. Ahli Teknik Bangunan Gedung	9	24 Maret 2023 - 23 Maret 2028	Perkindo
		b. Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Gedung	9	11 Sep 2023 - 10 Sep 2028	Perkindo
		c. Ahli Madya Geoteknik	8	6 Des 2023 - 5 Des 2028	Perkindo
		d. Asesor Kompetensi	-	26 Des 2022 - 25 Des 2025	Pertakonas
2	Pandu Yudha Kesuma, ST	a. Ahli Teknik Bangunan Gedung	9	08 Sept 2022 - 07 Sep 2027	Perkindo
		b. Ahli Teknik Dermaga	8	15 Des 2023 - 14 Des 2028	Perkindo
3	Nono Suhana, ST., MT	Ahli Teknik Bangunan Gedung	9	06 Des 2022 - 05 Des 2027	Perkindo
4	Adiyos Adnis, ST	Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung	9	25 Jan 2023 - 24 Jan 2028	Perkindo
5	Ahmad Nur Ihsan, ST	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung	8	05 Des 2022 - 04 Des 2027	Perkindo
6	Wildan Solihin, ST	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	7	30 Agu 2022 - 29 Agu 2027	Askonas
7	Muhammad Faizal R, ST	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	7	05 Ags 2024 - 04 Ags 2029	Astekindo
8	Kurnyawan Adi Negoro, ST	Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung	6	09 Sep 2022 - 08 Sep 2027	Askonas
9	Ikhwanul Amril, A.Md	Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum	Ahli - Muda	31 Mar 2022 - 30 Mar 2025	-
10	Dillan Rahasta Maranda Putra	Petugas K3 Umum	Petugas	06 Apr 2022 - 05 Apr 2025	-

10646914



BADAN NASIONAL  
SERTIFIKASI PROFESI  
INDONESIAN PROFESSIONAL  
CERTIFICATION AUTHORITY

### SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

No: 93000 2419 0154666 2022

Dengan ini menyatakan bahwa,  
*This is to certify that,*

**Sjafei Amri**

No. Reg. MET.000.010039.2022

Teah kompeten pada bidang  
*is competent in the area of*

**Asesmen/Uji Kompetensi  
Workplace Assessment**


Dengan Kualifikasi / Kompetensi:  
*With Qualification / Competency:*

**Asesor Kompetensi  
Assessor Of Competency**

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun  
*This certificate is valid for: 3 (three) Years*

Jakarta, 26 Desember 2022

Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
*Indonesian Professional Certification Authority*



**Kongjeng Masehat, S.H., M.M.**  
Ketua  
Chairman



**Daftar Unit Kompetensi**  
*List of Unit(s) of Competency*

NO	Kode Unit Kompetensi <i>Code of Competency Unit</i>	Judul Unit Kompetensi <i>Title of Competency Unit</i>
1.	P.85ASM00.001.02	Merencanakan Aktivitas dan Proses Asesmen <i>Plan of Assessment Activities and Processes</i>
2.	P.85ASM00.003.2	Melaksanakan Asesmen <i>Assess Competence</i>
3.	P.854900.047.01	Memberikan Kontribusi dalam Validasi Asesmen <i>Contribute to Assessment Validation</i>



**Sjafei Amri**  
Tanda tangan pemilik  
*Signature of holder*



9/12/23, 8:38 AM

Sertifikat SKK SJAFEI AMRI

**F7052473**



**BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
INDONESIA PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY**

**SERTIFIKAT KOMPETENSI  
CERTIFICATE OF COMPETENCE**

Nomor Sertifikat / Certificate Number  
**74321 2142.02 9 00093719 2023**

Dengan ini menyatakan bahwa,  
*This is to certify that,*

**SJAFEI AMRI**

No. Reg. F 1993 93719 2023 0092064 SI 01

Telah Kompeten pada bidang:  
*Is competent in the area of:*

**Jasa Konstruksi  
Construction Services**

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:  
*With Qualification / Competency:*

**Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung  
Building Functionality Appraiser Expert**

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun  
*This certificate is valid for 5 (five) years*

Alas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
*On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority*

**Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri  
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency**



**Yosep Fernando Putra**  
Ketua LSP  
Chairman PCA

9/12/23, 8:38 AM

Sertifikat SKK SJAFEI AMRI



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
JASA KONSTRUKSI  
CONSTRUCTION SERVICES  
DEVELOPMENT BOARD**

**Daftar Unit Kompetensi:  
List of Unit(s) of Competency:**

Klasifikasi	: Sipil
Classification	: Civil
Subklasifikasi	: Gedung
Subclassification	: Building
Kualifikasi	: Ahli
Qualification	: Expert
Jenjang	: 9 (Sembilan)
Level	: 9 (Nine)
Okupasi	: Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung
Occupation	: Building Functionality Appraiser Expert

Ditetapkan di Jakarta, 11 September 2023  
*Enacted in Jakarta, September 11, 2023*

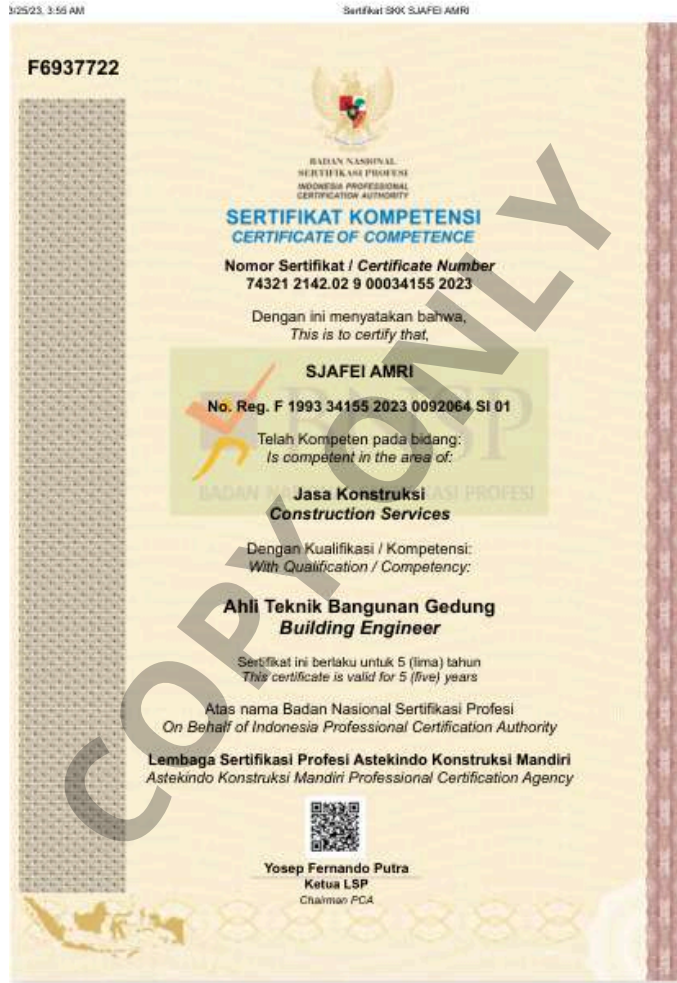


**SJAFEI AMRI**



Keterangan / Remarks :

- Sertifikat ini sah berlaku setelah terasah yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.
- QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi / QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.





15/12/23, 16:42 : Sertifikat SKK PANDU YUDHA KESUMA

**F7123707**



**BADAN NASIONAL  
SERTIFIKASI PROFESI  
INDONESIA PROFESSIONAL  
CERTIFICATION AUTHORITY**

**SERTIFIKAT KOMPETENSI  
CERTIFICATE OF COMPETENCE**

**Nomor Sertifikat / Certificate Number  
74321 2142.99 8 00119398 2023**

Dengan ini menyatakan bahwa,  
*This is to certify that,*

**PANDU YUDHA KESUMA**

**No. Reg. F 1993 119398 2023 0017752 SI 19**

Telah Kompeten pada bidang:  
*Is competent in the area of:*

**Jasa Konstruksi  
Construction Services**

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:  
*With Qualification / Competency:*

**Ahli Madya Teknik Dermaga  
Associate Expert of Pier Engineering**

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun  
*This certificate is valid for 5 (five) years*

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
*On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority*

**Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri  
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency**



**Yosep Fernando Putra, S.T.**  
Ketua LSP  
*Chairman PCA*

15/12/23, 16:42 : Sertifikat SKK PANDU YUDHA KESUMA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
JASA KONSTRUKSI  
CONSTRUCTION SERVICES  
DEVELOPMENT BOARD**

**Daftar Unit Kompetensi:  
List of Unit(s) of Competency:**

Klasifikasi	: Sipil
Classification	: Civil
Subklasifikasi	: Bangunan Pelabuhan
Subclassification	: Port Building
Kualifikasi	: Ahli
Qualification	: Expert
Jenjang	: 8 (Delapan)
Level	: 8 (Eight)
Okupasi	: Ahli Madya Teknik Dermaga
Occupation	: Associate Expert of Pier Engineering

Ditetapkan di Jakarta, 15 Desember 2023  
*Enacted in Jakarta, December 15, 2023*



**PANDU YUDHA KESUMA**



**Keterangan / Remarks :**

- Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.
- QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.



2/12/22, 11:53 AM

Sertifikat SKK NONO SUHANA, ST., MT.

**F6870976**

**BIKAS NASIONAL  
SERTIFIKASI PROFESI  
INDONESIA PROFESSIONAL  
CERTIFICATION AUTHORITY**

**SERTIFIKAT KOMPETENSI  
CERTIFICATE OF COMPETENCE**

**Nomor Sertifikat / Certificate Number  
74321 2142.02 9 00027739 2022**

Dengan ini menyatakan bahwa,  
*This is to certify that,*

**NONO SUHANA, ST., MT.**

**No. Reg. F 1993 27739 2022 0037586 SI 01**

Telah Kompeten pada bidang,  
*Is competent in the area of:*

**Jasa Konstruksi  
Construction Services**

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:  
*With Qualification / Competency:*

**Ahli Teknik Bangunan Gedung  
Building Engineer**

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun  
*This certificate is valid for 5 (five) years*

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
*On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority*

**Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri  
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency**

**Arrachim Maulana Putera  
Ketua LSP  
Chairman PCA**

12/16/22, 11:53 AM

Sertifikat SKK NONO SUHANA, ST., MT.

**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
JASA KONSTRUKSI  
CONSTRUCTION SERVICES  
DEVELOPMENT BOARD**

**Daftar Unit Kompetensi:  
List of Unit(s) of Competency:**

Klasifikasi : Sipil  
*Classification : CIVIL*

Subklasifikasi : Gedung  
*Subclassification : Building*

Kualifikasi : Ahli  
*Qualification : Expert*

Jenjang : 9 (Sembilan)  
*Level : 9 (Nine)*

Okupasi : Ahli Teknik Bangunan Gedung  
*Occupation : Building Engineer*

Ditetapkan di Jakarta, 06 Desember 2022  
*Enacted in Jakarta, December 06, 2022*

**NONO SUHANA, ST., MT.**

**Keterangan / Remarks:**

- Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.
- QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.

1/31/23, 8:03 PM Sertifikat SKK ADIYOS ADNIS

**F6896279**

**BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI**  
INDONESIA PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY

**SERTIFIKAT KOMPETENSI**  
*CERTIFICATE OF COMPETENCE*

Nomor Sertifikat / Certificate Number  
74321 2151.99 9 00000311 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,  
*This is to certify that,*

**ADIYOS ADNIS**

No. Reg. F 1997 00311 2023 0059182 ME 05

Telah Kompeten pada bidang:  
*Is competent in the area of.*

**Jasa Konstruksi**  
*Construction Services*

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:  
*With Qualification / Competency:*

**Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung**  
*Building Electrical Expert*

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun  
*This certificate is valid for 5 (five) years*

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
*On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority*

**Lembaga Sertifikasi Profesi Petakindo Konstruksi Mandiri**  
*Petakindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency*

**Syamsudin Kurnia Bagia**  
Ketua LSP  
Chairman PCA

1/31/23, 8:03 PM Sertifikat SKK ADIYOS ADNIS

**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**  
*CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD*

**Daftar Unit Kompetensi:**  
*List of Unit(s) of Competency:*

Klasifikasi	: Mekanikal
Classification	: <i>MECHANICAL</i>
Subklasifikasi	: Teknik Mekanikal
Subclassification	: <i>Mechanical Engineering</i>
Kualifikasi	: Ahli
Qualification	: <i>Expert</i>
Jenjang	: 9 (Sembilan)
Level	: <i>9 (Nine)</i>
Okupasi	: Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung
Occupation	: <i>Building Electrical Expert</i>

Ditetapkan di Jakarta, 25 Januari 2023  
*Enacted in Jakarta, January 25, 2023*

**ADIYOS ADNIS**

**Keterangan / Remarks :**

- Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.
- QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction services.

F6870082



BADAN NASIONAL  
SERTIFIKASI PROFESI  
INDONESIA PROFESSIONAL  
CERTIFICATION AUTHORITY

**SERTIFIKAT KOMPETENSI**  
**CERTIFICATE OF COMPETENCE**

Nomor Sertifikat / Certificate Number  
74321 2142.02 8 00027425 2022

Dengan ini menyatakan bahwa,  
This is to certify that,

**AHMAD NUR ICHSAN, S.T.**

No. Reg. F 1993 27425 2022 0037318 SI 01

Telah Kompeten pada bidang:  
Is competent in the area of:

**Jasa Konstruksi**  
**Construction Services**

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:  
With Qualification / Competency:

**Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung**  
**Associate Expert in Building Engineering**

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun  
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

**Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri**  
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency



**Arrachim Maulana Putera**  
Ketua LSP  
Chairman PCA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
JASA KONSTRUKSI  
CONSTRUCTION SERVICES  
DEVELOPMENT BOARD**

**Daftar Unit Kompetensi:**  
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi	: Sipil
Classification	: CIVIL
Subklasifikasi	: Gedung
Subclassification	: Building
Kualifikasi	: Ahli
Qualification	: Expert
Jenjang	: 8 (Delapan)
Level	: 8 (Eight)
Okupasi	: Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung
Occupation	: Associate Expert in Building Engineering

Ditetapkan di Jakarta, 05 Desember 2022  
Enacted in Jakarta, December 05, 2022



**AHMAD NUR ICHSAN, S.T.**



Keterangan / Remarks:

- Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dikuatkan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.
- QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction services.







  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIRECTORATE GENERAL OF LABOR INSPECTION DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

## Sertifikat

Nomor  
NOMOR 5/3415/AS.01.03/III/2022

**Diberikan Kepada :**  
This is given to:

**Nama :** IGHWANUL AMRIL  
**Tempat, tanggal lahir :** Bandung, 17 Juli 1986  
**Perusahaan/Instansi :** PT Binanusa Prasetia & Sekayasa

**TELAH MENGIKUTI**  
The certificate holder has attended

**PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)**  
The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms

Dielenggarakan oleh  
Held by  
**PT Lentera Dufita Persada**  
Tanggal 14 - 29 Maret 2022  
On March 14 until 29, 2022

Pemegang Sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai  
The holder of this certificate qualifies the requirements as  
**Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja**  
Occupational Safety and Health expert candidate

sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara  
Penyusunan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
According to the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number Per 02/Men/1992 concerning the  
Procedure of Appointment, Obligations and Authority of Occupational Safety and Health Expert


Jakarta, 31 Maret 2022  
Date: March 31, 2022  
a.n. Direktur Jenderal  
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3,  
in behalf of Director General of Labor Inspection Development and Occupational Safety and Health,  
**Dirktur Bina Ketenagakerjaan K3,**  
Head of Binanusa Prasetia & Sekayasa, Occupational Development,  
  
**Hery Sutanto, S.T., M.M.**  
NIP. 19710922 199703 1 002



**MATERI PEMBINAAN**  
**CALON AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (AK3) UMUM**  
THE CURRICULUM TRAINING OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH) EXPERT

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970  
Act Number 1 of the 1970 Concerning Occupational Safety
2. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
Occupational Safety and Health National Policy
3. Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
The Principles of Occupational Safety and Health
4. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
Occupational Safety and Health Committee
5. Pengawasan Kesehatan Kerja  
Occupational Health Inspection
6. Pengawasan Lingkungan Kerja  
Working Environment Inspection
7. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perangulungan Kebakaran  
Fire Prevention Occupational Safety and Health Inspection
8. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Instalasi Listrik  
Electrical Installation Occupational Safety and Health Inspection
9. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan  
Occupational Safety and Health on Building Construction Inspection
10. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mekanik  
Mechanical Occupational Safety and Health Inspection
11. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Uap  
Boiler Occupational Safety and Health Inspection
12. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan  
Pressure Vessel Occupational Safety and Health Inspection
13. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)  
Occupational Safety and Health Management System
14. Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
Audit of Occupational Safety and Health Management System
15. Manajemen Risiko  
Risk Management
16. Analisa Kecelakaan  
Accident Analysis
17. Laporan Statistik Kecelakaan  
Report of Accident Statistics
18. Praktek Kerja Lapangan  
On The Job Training
19. Seminar  
Seminar
20. Evaluasi  
Evaluation

6787032



**SERTIFIKAT KOMPETENSI**  
**CERTIFICATE OF COMPETENCE**

No. 79429 2149 0000093 2022

Dengan ini menyatakan bahwa,  
This is to certify that,

**DILLAN RAHASTA MARANDA PUTRA**

No. Reg. P. 2023.0000093 2023

Telah kompeten pada bidang  
in competent in the field of

**KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA**  
Occupational Health & Safety

Dengan Kualifikasi / Kompetensi  
With Qualification / Competency :

**PERSONIL KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA**  
Occupational Health and Safety Personnel

Telah Menyelesaikan Pelatihan Kompetensi  
Has Completed its Competency Training


**Petugas K3 Umum**  
General OHS Officer

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun  
This certificate is valid for: 3 (three) Years


Soekoregoro, 06 April 2022

Atas Nama BNSP  
On behalf of BNSP

Lembaga Sertifikasi Profesi Pengembangan Energi & Mineral Indonesia  
Professional Certification Body of Indonesian Energy & Mineral Development



Angga P. Putra, SE  
Ketua  
Chairman



**Daftar Unit Kompetensi**  
List of Unit(s) of Competency

NO	Kode Unit Unit Code	Judul Unit Unit Title
1	M.7100001.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko K3 di Tempat kerja Designing strategies To Control OHS Risks in The Workplace
2	M.7100001.002.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat. Designing an Emergency Response System
3	M.7100001.003.1	Melakukan Komunikasi K3. Conducting OHS Communication
4	M.7100001.004.1	Mengawasi Pelaksanaan Ltn Kerja. Overseeing The Implementation of Work Permit
5	M.7100001.005.1	Melakukan Pengukuran Faktor (stres) di Tempat kerja. Measuring Hazard Factors in the Workplace
6	M.7100001.006.1	Mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K) di Tempat Kerja. Managing First Aid in Workplace Accidents at Work
7	M.7100001.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat. Managing Emergency Response Actions
8	M.7100001.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri (APD) di Tempat Kerja. Managing Personal Protective Equipment at the Workplace
9	M.7100001.009.1	Memastikan Progress Pelayanan Kesehatan Kerja. Implementing Work Health Care Programs
10	M.7100001.010.1	Mengelola Sistem Dokumentasi K3. Managing the System of OHS Documentation
11	M.7100001.011.1	Memastikan Manajemen Risiko K3. Implementing OHS Risk Management
12	M.7100001.012.1	Mengevaluasi Pemenuhan Peryaratan dan Prosedur K3. Evaluating the Fulfillment of OHS Requirements and Procedures
13	M.7100001.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja. Conducting Work Accident Investigations

Soekoregoro, 06 April 2022

Lembaga Sertifikasi Profesi Pengembangan Energi & Mineral Indonesia  
Professional Certification Body of Indonesian Energy & Mineral Development



**DILLAN RAHASTA MARANDA PUTRA**  
Tanda tangan pemilik  
(Signature of holder)



**Triwiyati Ayu Ningali**  
Bagian Administrasi  
(Field Of Administration)



## SBU AKTIVITAS ARSITEKTUR (AR001)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT BADAN USAHA  
(SBU) KONSTRUKSI  
PB-UMKU: 021301015069500040002**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pemilik Usaha berikut ini:

- Nama Pemilik Usaha : PT BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA  
: 0213010150005
- Nama Induk Berusaha (NIB) : 0213010150005
- Alamat Kantor : Jl. GEDIRKAWONS HILIR NO 17E, DesaKeturahan Serjati, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat  
Kode Pos: 40151
- Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDA)
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 71101 - Aktivitas Arsitektur
- Lokasi Usaha : J. Gegerwangi No. 175 DesaKeturahan Serjati, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat  
Kode Pos: 40151

Terdahului pernyataan:

- Bersedia Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pakar Jasa Konstruksi dan/atau Pakar Jasa Konstruksi Terintegrasi)
- Bersedia Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pemilik Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditentukan tanggal: 20 Februari 2023

**A.N. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Ditetak tanggal: 20 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan dalam Sistem Informasi Data dan Pelaku Usaha, terapan dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pemilik Usaha.  
2. Dalam hal terjadi perubahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini tidak dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/BSSN.  
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan fitur akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI  
LAMPIRAN  
PB-UMKU: 021301015069500040002**

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA:

- Asosiasi yang diikuti : PERKINDO  
 Nama PTBU : 00HWANUL AMUL  
 Nama PTBU : SJAFEL AMH / 1.2.201.1.076.09.1100950  
 Nama PTBU 2 : -  
 E-mail : corporate@binanusa.co.id  
 NPWP : 019359348428000  
 Jenis Usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi  
 Nomor Registrasi LPJK : F.3.01.AR.K.11.2023.0930805  
 Ditetapkan tanggal : 2023-02-20  
 Masa Berlaku s.d. : 2026-02-19

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



**Keterangan:**  
 Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pemakai usaha yang tercantum pada halaman LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diunduh menggunakan Aplikasi Jejaktrus.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam Sistem Informasi Data dan Pelaku Usaha, terapan dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pemilik Usaha.  
2. Dalam hal terjadi perubahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini tidak dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/BSSN.  
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan fitur akses.

### Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
I.	Kecil	AR001	Umum	71101	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian	WILDAN SOLIHIN F.1993.12472.2022.0016448 SI/01

Pelaksana sertifikasi : PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO)

1. Dokumen ini diterbitkan dalam Sistem Informasi Data dan Pelaku Usaha, terapan dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pemilik Usaha.  
2. Dalam hal terjadi perubahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini tidak dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/BSSN.  
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan fitur akses.

## SBU AKTIVITAS ARSITEKTUR LAINNYA (AR002)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT BADAN USAHA  
(SBU) KONSTRUKSI**

**PB-UMKU: 021301015069500010003**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	PT BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	0213010150695
3. Alamat Kantor	Jl. GEGERKALONG HILIR NO. 175, Desa/Kelurahan Sarjadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151
4. Status Penanaman Modal	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	71101 - Aktivitas Arsitektur
6. Lokasi Usaha	Jl. Gegerkalong Hilir 175 Desa/Kelurahan Sarjadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151

Taluh memenuhi persyaratan:

1. Standar Pendataan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pelaksanaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Tertentu)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha terdapat di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan pasal-pasal undang-undang yang berlaku.

Ditetapkan tanggal: 12 September 2023  
Peraturan ke-1, tanggal:

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Ditetapkan tanggal: 12 September 2023

1. Dokumen ini diterbitkan dalam Sistem Informasi Data dan Pelaku Usaha, merupakan dokumen Sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini tidak sah apabila tidak diterbitkan di dalam lingkungan platform integritas nasional.
3. Dokumen ini wajib ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/ESDN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat dipantau melalui sistem OSS menggunakan link berikut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI  
LAMPIRAN**

**PB-UMKU: 021301015069500010003**

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA:

Asosiasi yang diikuti	: PERKINDO
Nama PTBU	: IKHWANUL AMRIL
Nama PTBU 2	: SJAFAI AMRI / F 1993 34155 2023 0092064 SI 01
Nama PTBU 2	: -
E-mail	: corporate@binanusa.co.id
NPWP	: 019359348428000
Jenis Usaha	: Jasa Konsultansi Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.3.01.AR.K.11.2023.0030805
Ditetapkan tanggal	: 2023-09-12
Masa Berlaku s.d.	: 2026-09-11

Ditetapkan sebagai Badan Usaha jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diunduh menggunakan Aplikasi Jakartanet.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam Sistem Informasi Data dan Pelaku Usaha, merupakan dokumen Sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini tidak sah apabila tidak diterbitkan di dalam lingkungan platform integritas nasional.
3. Dokumen ini wajib ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/ESDN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat dipantau melalui sistem OSS menggunakan link berikut.



### Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkita	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	AR002	Umum	71101	Jasa Arsitektural Lainnya	WILDM SOLIHIN F 1993 32472 2022 0016448 SI 01

Pelaksana sertifikasi : PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO)

1. Dokumen ini diterbitkan dalam Sistem Informasi Data dan Pelaku Usaha, merupakan dokumen Sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini tidak sah apabila tidak diterbitkan di dalam lingkungan platform integritas nasional.
3. Dokumen ini wajib ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/ESDN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat dipantau melalui sistem OSS menggunakan link berikut.



# SBU AKTIVITAS DESAIN INTERIOR BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL (AR003)

  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**SERTIFIKAT BADAN USAHA**  
**(SBU) KONSTRUKSI**  
**PB-UMKU: 021301015069500040003**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0213010150695
3. Alamat Kantor	: Jl. DEGIKALANG, HLIR, NO. 175, Desa/Kelurahan Sarjak, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Kualifikasi Batu Lapisan Usaha (KBL)	: 74120 - Aktivitas Desain Interior
6. Lokasi Usaha	: Jl. Gegerkang Hill 170 Desa/Kelurahan Sarjak, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40151

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pakejaan Konstruksi dan/atau Pakejaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan tanggal: 20 Februari 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

  
Ditandatangani secara elektronik

Ditetak tanggal: 20 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan dalam QR Code berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS yang dapat terintegrasi dengan Pelaku Usaha.  
2. Dokumen ini tidak dapat diterbitkan, diubah, atau dicetak ulang tanpa persetujuan dari BPPK-ESDN.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPK-ESDN.  
4. Data digital Pelaku Usaha dapat dipertahankan melalui sistem OSS menggunakan fitur akses



  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI**  
**LAMPIRAN**  
**PB-UMKU: 021301015069500040003**

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA:

Asosiasi yang diikuti	: PERKINDO
Nama PJB	: IKHWANUL AMRIL
Nama PJB 2	: SAFAE AMRI / 1.2.201.1.076.09.1100950
E-mail	: corporate@binanusa.co.id
NPWP	: 019359348428000
Jenis Usaha	: Jasa Konsultansi Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.3.01.ARK.11.2023.0030805
Ditetapkan tanggal	: 2023-02-20
Masa Berlaku s.d.	: 2026-02-19

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

  
Keterangan:  
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut. dan dapat overfikasi menggunakan Aplikasi jakontul.


1. Dokumen ini diterbitkan dalam QR Code berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS yang dapat terintegrasi dengan Pelaku Usaha.  
2. Dokumen ini tidak dapat diterbitkan, diubah, atau dicetak ulang tanpa persetujuan dari BPPK-ESDN.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPK-ESDN.  
4. Data digital Perizinan Berusaha dapat dipertahankan melalui sistem OSS menggunakan fitur akses




**Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi**

No	Kualifikasi	Kode Subkita	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	AR003	Umum	71101	Jasa Arsitektural Lainnya	WILDM SOLJHR F 1993 12472 2022 5016448 51 01

Peleksi sertifikasi : PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO)

  
Keterangan:  
1. Dokumen ini diterbitkan dalam QR Code berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS yang dapat terintegrasi dengan Pelaku Usaha.  
2. Dokumen ini tidak dapat diterbitkan, diubah, atau dicetak ulang tanpa persetujuan dari BPPK-ESDN.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPK-ESDN.  
4. Data digital Perizinan Berusaha dapat dipertahankan melalui sistem OSS menggunakan fitur akses



# SBU AKTIVITAS REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN DAN NON HUNIAN (RK001)



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT BADAN USAHA  
(SBU) KONSTRUKSI  
PB-UMKU: 021301015069500040001**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                    | PT BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)           | 0213010150695  |
| 3. Alamat Kantor                        | Jl. GEGERKALONG HILIR NO. 175, Desa Kelurahan Sarjati, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat<br>Kode Pos: 40151 |
| 4. Status Penanaman Modal               | Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  |
| 5. Kode Klasifikasi Suku Lapangan Usaha | 71102 - Aktivitas Kearsyuran dan Konsultasi Teknis YBDI Indonesia (KBLI)   |
| 6. Lokasi Usaha                         | Jl. Gegerkalong Hilir 175 Desa Kelurahan Sarjati, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat<br>Kode Pos: 40151      |

Telah memenuhi persyaratan:

- Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
- Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dibekalkan tanggal: 20 Februari 2023

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Doraek tanggal: 20 Februari 2023



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI  
LAMPIRAN  
PB-UMKU: 021301015069500040001**

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| Asosiasi yang dilikuti | : PERKONDO                              |
| Nama PJB               | : HAYWANUL AMRIL                        |
| Nama PTBU 1            | : SAFEI AMRI / 1.2.201.1.076.09.1100950 |
| Nama PTBU 2            | : --                                    |
| E-mail                 | : corporate@binanusa.co.id              |
| NPWP                   | : 019359348428000                       |
| Jenis Usaha            | : Jasa Konsultansi Konstruksi           |
| Nomor Registrasi LPJK  | : F.3.01.RK.K.11.2023.0630805           |
| Ditetapkan tanggal     | : 2023-02-20                            |
| Masa Berlaku s.d.      | : 2026-02-19                            |

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



**Keterangan:**  
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi berikut.

- Dokumen ini dibekalkan dalam sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, dokumen dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dokumen ini wajib dibekalkan di dokumen ini akan dibekalkan apabila sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini tidak dibekalkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN e-Sign.
- Data tunggal Perizinan Berusaha dapat disimpan melalui sistem OSS menggunakan App store.



### Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKB
I.	Kac0	RK001	Umum	71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian	AHMAD NUR ICHSAR, S.T. F 1991 27425 2022 0037318 SI 01

Pelaksana sertifikasi : PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKONDO)

- Dokumen ini dibekalkan dalam sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, dokumen dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dokumen ini wajib dibekalkan di dokumen ini akan dibekalkan apabila sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini tidak dibekalkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN e-Sign.
- Data tunggal Perizinan Berusaha dapat disimpan melalui sistem OSS menggunakan App store.



## SBU AKTIVITAS REKAYASA MEKANIKAL DALAM BANGUNAN (RK004)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT BADAN USAHA  
(SBU) KONSTRUKSI  
PB-UMKU: 021301015069500050001**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0213010150695
3. Alamat Kantor : Jl. GEGERKALONG HILIR NO. 175, DesaKaturahan Sarijati, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat  
Kode Pos: 40151
4. Status Pemenuhan Modal : Perencanaan Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : T1102 - Aktivitas Kearsyahan dan Konsultasi Teknik YB01
6. Lokasi Usaha : Jl. Gegerkalong Hilir 175, Kelurahan: Sarijati Kecamatan: Sukasari Kab/Peta: Kota Bandung Provinsi: Jawa Barat Desa/Kelurahan: Sarijati, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat  
Kode Pos: 40151

Terdahului persyaratan:

1. Standar Pemenuhan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Tertentu)
  2. Standar Pemenuhan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)
- Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuatkan tanggal: 12 September 2023

**h.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi**

**Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani tanggal: 12 September 2023



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI  
LAMPIRAN  
PB-UMKU: 021301015069500050001**

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. BINANUSA PRACETAK DAN REKAYASA:

- Asosiasi yang diikuti : PERKINDO  
 Nama PTBU : BINANUSA AMRI  
 Nama PTBU 2 : SSAFE AMRI / F 1993 34155 2023 0092064 SI 01  
 Nama PTBU 3 : --  
 E-mail : corporate@binanusa.co.id  
 NPWP : 019359348428000  
 Jenis Usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi  
 Nomor Registrasi LPJK : F.3.01.RK.K.11.2023.0030805  
 Ditetapkan tanggal : 2023-09-12  
 Masa Berlaku s.d. : 2026-09-11

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



**Keterangan:**  
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercantum pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jaminan.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam Sistem Elektronik dan/atau Pelaku Usaha, merupakan dokumen dalam Sistem Elektronik yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini dapat diterbitkan di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini tidak dapat digunakan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem Sistem Elektronik menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan dalam Sistem Elektronik dan/atau Pelaku Usaha, merupakan dokumen dalam Sistem Elektronik yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini dapat diterbitkan di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini tidak dapat digunakan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem Sistem Elektronik menggunakan hak akses.



### Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Facil	RK004	Umum	T1102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan	ADYD5 ADNS F 1997 00311 2023 0019182 ME 05

Pelaksana sertifikasi : PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO)

1. Dokumen ini diterbitkan dalam Sistem Elektronik dan/atau Pelaku Usaha, merupakan dokumen dalam Sistem Elektronik yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini dapat diterbitkan di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini tidak dapat digunakan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem Sistem Elektronik menggunakan hak akses.



### LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

2020



BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

NPWP	: 01 935 934 0 428 000
NAMA WAJIB PAJAK	: BINANUSA PRACETAK REKAYASA
ALAMAT WAJIB PAJAK	: JL GEGERKALONG HLIR NO 175 RT 001 RW 001
JENIS PAJAK	: SPT Tahunan PPh Badan Rupiah
MASA / TAHUN PAJAK	: 12 / 2020
KODE PEMBETULAN	: 0
STATUS SPT	: NIHI
NOMOR TRANSAKSI PENGIRIMAN	: 0011819796337000
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK	: 51348401231230021103
TANGGAL PENERIMAAN	: 30/04/2021 23:16:37 WIB
KODE PENYEDIA JASA APLIKASI	: 001

Edukasi laporan pajak online ini sah dari DJP. PT Achilles Advanced Systems (OnlinePajak) adalah aplikasi mitra resmi DJP dengan Surat Keputusan No. KEP-528/PJ/2019.

TERDAFTAR DAN DIWASILI OLEH DJP



2021

Penyampaian SPT Elektronik  
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : BINANUSA PRACETAK REKAYASA  
NPWP : 01.935.934.8-428.000  
Tahun Pajak : 2021  
Masa Pajak : 01-12  
Jenis SPT : 1771  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Nihil  
Nominal : 0  
Tanggal Penyampaian : 30/04/2022  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 62348406528221030202  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

2022

Penyampaian SPT Elektronik  
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : BINANUSA PRACETAK REKAYASA  
NPWP : 019359348428000  
Tahun Pajak : 2022  
Masa Pajak : 01/12  
Jenis SPT : 1771  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Nihil  
Nominal : 0  
Tanggal Penyampaian : 28/04/2023  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 82348406552231028031  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

2023

Penyampaian SPT Elektronik  
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : BINANUSA PRACETAK REKAYASA  
NPWP : 019359348428000  
Tahun Pajak : 2023  
Masa Pajak : 01/12  
Jenis SPT : 1771  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Nihil  
Nominal : 0  
Tanggal Penyampaian : 29/04/2024  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 55348406559241029532  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

## PERYATAAN KEPEMILIKAN REKENING



corporate@binanusa.co.id  
www.binanusa.co.id  
+62.22.2003252

### SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN REKENING

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ashadisetya Kesuma  
NIK KTP : 3273010303820005  
Alamat : Jalan Cijerokaso No 67 Bandung

Menyatakan bahwa benar untuk nomor rekening berikut ini adalah milik PT Binanusa Pracetak & Rekayasa dan digunakan untuk kepentingan Perusahaan :

No. Rekening : 800.11.43572.00  
Nama Bank : CIMB Niaga Cab. Setiabudi Bandung  
Nama Rekening : Binanusa Pracetak & Rekayasa

Demikian Surat Pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bandung, 20 April 2021



Ashadisetya Kesuma  
Direktur Utama

0813 1313 3252

binanusa\_id

Binanusa

PT Binanusa Pracetak & Rekayasa

PT BINANUSA PRACETAK & REKAYASA

Jalan Cijerokaso No. 92 BANDUNG – JAWA BARAT – INDONESIA (40151)

## PAKTA INTEGRITAS

1. Mentaati semua peraturan dan kebijakan perusahaan;
2. Dengan Profesionalitas dan Integritas selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh Karyawan PT Binanusa Pracetak dan Rekayasa, Mitra Kerja dan Masyarakat;
3. Menjaga kerahasiaan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Republik Indonesia;
4. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional;
5. Mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik;
6. Apabila dengan sengaja saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;





## KLIEN

Beberapa klien yang telah mempercayai kami:



## PENGALAMAN PEKERJAAN

Pengalaman pekerjaan PT Binanusa Pracetak & Rekayasa selama 24 (Dua Puluh Empat) tahun terakhir meliputi berbagai kegiatan perencanaan, investigasi, pengawasan, survey, perbaikan gedung, jembatan dan pelabuhan hampir di seluruh Indonesia yang sudah kami lakukan, sebagai berikut:



**Survey Existing Facilities Pertamina RDMP RU-V, Balikpapan**



**Audit Forensik Gedung DPR RI, Jakarta**



**Assessment Hanggar 4 GMF Aero Asia, Tangerang**



**Assessment Bangunan Gedung Wisma Atlet, Jakarta**



**Audit Forensik dan Keandalan Struktur Bangunan Gedung Kantor PT Tiara Marga Trakindo, Jakarta**



**Investigasi Struktur Bangunan PT Biofarma, Bandung**



**Pengujian Pembebanan Statis Pada Jembatan Teluk Kendari, Sulawesi**



**Pengujian Struktur Bangunan Epicentrum Walk PT Bakrie Swastika Utama, Jakarta**



**Investigasi Pekerjaan Pada Bangunan Silo PT Solusi Bangunan Indonesia, Tuban**

**PENGALAMAN PEKERJAAN**

**2019**

<b>NO</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>JENIS</b>	<b>NAMA KLIEN</b>
1	Pemeriksaan Struktur Rumah Tinggal Komplek Kalista, Bandung	GEDUNG	PT. BINANUSA
2	Investigasi Struktur Masjid Istiqamah, Bandung	GEDUNG	PT. BINANUSA
3	Investigasi Struktur Bangunan Ruko Hayam Wuruk, Jakarta Barat	GEDUNG	PT. PRAPANCA
4	Investigasi Bangunan Masjid, Batam	GEDUNG	PT. TESTINDO
5	Investigasi Struktur Bangunan Pasar Baru Bandung, Kota Bandung	GEDUNG	PT. Syafril Janizar
6	Investigasi Pada Bangunan Gedung Rusunawa Sadang Serang, Bandung	GEDUNG	PT. ALOCITA
7	Investigasi Pada Struktur Bangunan DPR-RI Gedung Nusantara, Jakarta Pusat	GEDUNG	PT. PASYA Mitra Utama
8	Desain dan Pengawasan Proyek Plaster Dinding Hotel Millenium, Sirih Jakarta	GEDUNG	PT. BINANUSA
9	Investigasi Struktur Bangunan Dermaga Barat PT. Jakarta International Container Terminal, Jakarta	PELABUHAN	PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
10	Assesment Dermaga TBBM Kertapati Lama, Palembang	PELABUHAN	PT. Yodya Karya
11	Pengujian Underwater Bangunan Dermaga Terminal Bahan Bakar Minyak PT. Pertamina Wayame, Ambon	PELABUHAN	PT. LAPI ITB
12	Pengujian Pelabuhan PT Inalum Kuala Tanjung, Sumatera Utara	PELABUHAN	PT. Testindo
13	Pengujian Pelabuhan Belawan, Sumatra Utara	PELABUHAN	PT. Testindo
14	Pengujian Struktur Bangunan Dermaga PT. Chandra Asri Petrochemical Cilegon, Banten	PELABUHAN	PT. Chandra Asri
15	Pengujian Struktur Bangunan Dermaga Penyeberangan (TNI AL), Jakarta Utara	PELABUHAN	PT. Reka Prima

16	Investigasi Pada Struktur Gardu Induk Peda, Wonosari	BENDUNGAN	PT. CG POWER SYSTEM INDONESIA
17	Pengujian Struktur Bangunan Jembatan Holtekamp, Kota Jayapura	JEMBATAN	PT. BINANUSA
18	Pengujian Pada Struktur Jembatan Siak, Riau	JEMBATAN	PT. BINANUSA
19	Pengujian Struktur Jembatan 2 Balerang, Batam	JEMBATAN	PT. BINANUSA
20	Pengujian Struktur Pier Pembangunan 6 Ruas Toll Dalam Kota, Jakarta	JEMBATAN	PT. BINANUSA
21	Pengujian Struktur Box Girder, Bekasi Timur	JEMBATAN	PT. ADHI KARYA
22	Pengujian Serta Analisis Pada Struktur Jembatan Cikunir, Jakarta	JEMBATAN	PT. BINANUSA
23	Pengujian Pada Struktur Jembatan Sei Lilin Dan Jembatan Rimba Rakit Jalan Palembang-Jambi	JEMBATAN	CV NADYA GUNAKARYA CIPTA
24	Pengujian Struktur Jembatan Jagir, Surabaya	JEMBATAN	PT. FEVA INDONESIA & PT. MIX PRO INDONESIA
25	Pekerjaan Pengangkatan Girder Struktur Jembatan Nasional Suramadu, Surabaya	JEMBATAN	CV ASTRON MEGA
26	Investigasi Pada Struktur Jembatan Intake PLTA Panglima Besar Jenderal Soedirman, Banjarnegara	JEMBATAN	PT. TESTINDO
27	Investigasi Pada Struktur Jembatan Serayu, Jawa Tengah	JEMBATAN	PT. TESTINDO
28	Pengujian Struktur Jembatan Martadipura, Kalimantan Timur	JEMBATAN	Manajemen Jembatan Martadipura
29	Assesment Keandalan Struktur Metoda Perbaikan Bangunan, Sukabumi	GEDUNG	PT. BUANA MEDIKA INDONESIA
30	Pengujian Struktur Jembatan Mahakam IV (Jembatan Kembar), Samarinda - Kaltim	JEMBATAN	PT. Pratama Daya Cahya
31	Pengujian Gedung GMF Aero Asia Soekarno Hatta International Airport, Jakarta	GEDUNG	PT GMF Aero Asia
32	Pengujian Gedung STMIK, Bandung	Gedung	PT DIANDRA
33	Pengujian Kapasitas Lantai Bangunan, Purworejo	Gedung	PT PP

NO	PEKERJAAN	JENIS	NAMA KLIEN
1	Investigasi Struktur Bangunan PT. Unilever Indonesia - Walls Factory, Cikarang	GEDUNG	PT. PRAPANCA ENGINEERING
2	Analisis Keandalan Struktur Bangunan Gedung PT. Reasuransi Nasional Indonesia, Jakarta Pusat	GEDUNG	PT. BINANUSA
3	Pengujian dan Analisa Struktur Bangunan PT. Tiara Margo Trakindo, Jakarta Selatan	GEDUNG	PT. Tambarang Elastika Mas
4	Pengujian Struktur Bangunan Rumah 2 Lantai, Jakarta Pusat	GEDUNG	PT. PRAPANCA ENGINEERING
5	Pengujian Kedalaman Retakan Beton Struktur Bangunan Depo LRT Jatimulya, Bekasi	GEDUNG	PT. TESTINDO
6	Pengujian Bangunan RSUD, Soreang	GEDUNG	PT.PEMBANGUNAN Perumahan, Persero
7	Investigasi Struktur Bangunan Laboratorium Bea dan Cukai, Cempaka Putih	GEDUNG	PT. TESTINDO
8	Investigasi Struktur Bangunan PT. Astra Daihatsu Gedung Underbody, Bekasi	GEDUNG	PT. BINANUSA
9	Investigasi Gedung PT. Pegadaian (Persero), Jakarta	GEDUNG	PT. REKA PRIMA
10	Analisis Struktur Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru	GEDUNG	PT. BINANUSA
11	Investigasi Struktur Bangunan Universitas Al-Azhar, Jakarta	GEDUNG	PT. TAMBARANG ELASTIKA MAS
12	Investigasi Struktur Bangunan RSUD Banten, Bantani	GEDUNG	PT. BINANUSA
13	Pengujian Struktur Bangunan KPK, Jakarta	GEDUNG	PT. REKA PRIMA
14	Investigasi Struktur Bangunan Ruko Metro Sunter, Jakarta	GEDUNG	Bpk. Nurmantias
15	Assessment Struktur Pelabuhan Pertamina RU VII Kasim, Sorong Papua	PELABUHAN	PT. LAPI ITB
16	Investigasi Struktur Bangunan Jembatan Air Buluh dan Air Lubuk Raman, Sumatera Selatan	JEMBATAN	PT. Reka Anugrah Cipta Mandiri

17	Investigasi Struktur Bangunan Jembatan Kelakar, Sumatera Selatan	JEMBATAN	PT. Reka Anugrah Cipta Mandiri
18	Pengujian Struktur Jembatan simpang air II, Sumatera Selatan	JEMBATAN	PT. MEGASARI SEJATI
19	Pengujian Struktur Trafo GI 150 kV Tawaeli Palu, sulawesi Tengah	BENDUNGAN	PT Niagamas Setiausaha
20	Investigasi Struktur Bangunan Pertamina RU Balongan, Indramayu	BENDUNGAN	PT Rekayasa Industri
21	Investigasi Struktur Pondasi Tembok Penahan Tanah Jalan, Labuan Bajo	BENDUNGAN	CV. BETA TAU ENGINEERING
22	Investigasi Struktur Gedung BIDA, Batam	GEDUNG	PT. Sjafril Janizar
23	Loading Test Struktur Jembatan, Teluk Kendari	JEMBATAN	PDCM
24	Investigasi Struktur Bangunan Dermaga Petikemas Koja, Jakarta	PELABUHAN	PT. Hajar Aswad Konstrukindo
25	Investigasi Struktur Bangunan Universitas Tadulako, Palu	GEDUNG	PT. Geocipta Bangun Optima
26	Investigasi Struktur Gedung RSUD Tebet, Jakarta	GEDUNG	PT. Syapril Janizar
27	Investigasi Struktur Bangunan PT Sr12 Herbal Perkasa, Bogor	GEDUNG	PT. Testindo
28	Investigasi Struktur Bangunan Pasar Pulung Kencana, Lampung	GEDUNG	Laboratorium Universitas Bandar Lampung
29	Investigasi Struktur Bangunan Wisma Atlet, Kemayoran	GEDUNG	PT. ADHI KARYA
30	Investigasi Bangunan Gedung BKD Dan Dishub, Provinsi Banten	GEDUNG	Universitas Mathla'ul Anwar Banten
35	Penggantian Elastomeric Rubber Bearing dan Perbaikan Beton Jembatan, Papua	JEMBATAN	PT. BINANUSA
36	Investigasi Jembatan Kota Baru Parahiangan, Bandung	JEMBATAN	PT. BINANUSA
37	Investigasi Struktur Bangunan Jetty PT. Siam Maspion Terminal, Gresik	PELABUHAN	PT. ATRYA SWASCIPTA REKAYASA

38	Investigasi Struktur Bangunan Jetty PT Asahimas Chemical, Jakarta	PELABUHAN	PT. ATRYA SWASCIPTA REKAYASA
39	Investigasi Struktur Gedung PT. Biofarma, Bandung	GEDUNG	PT. BINANUSA
40	Assessment dan RE Engineering Terminal, Bandung	GEDUNG	PT LAPI ITB
41	Pengujian Struktur RDMP Pertamina RU V, Balikpapan	PELABUHAN	PT PRAPANCA ENGINEERING
42	Investigasi & Analisis Dermaga Redco, Jakarta	PELABUHAN	PT BIRO KLASIFIKASI
43	Perbaikan dan Penguatan Struktur Bangunan Reasuransi Nasional Indonesia, Jakarta	GEDUNG	PT REASURANSI
44	Pemeriksaan Komponen Struktur Bangunan RDMP Pertamina, Balikpapan	PELABUHAN	PT PRAPANCA ENGINEERING

2021

NO	PEKERJAAN	JENIS	NAMA KLIEN
1	Investigasi Struktur Bangunan Rumah Tinggal, Bogor	GEDUNG	PT. Prapapanca Engineering
2	Investigasi Struktur Jembatan Kuning Kota Baru Parahyangan, Bandung	JEMBATAN	PT. BINANUSA
3	Investigasi Struktur Gedung Ikea, Bandung	GEDUNG	PT. Total Bangun Persada
4	Investigasi Struktur Bangunan Gedung Assa Rent, Pekanbaru	GEDUNG	PT. Tambarang Global Pratama
5	Pengujian Struktur Bangunan Silo 2 Tuban, Jawa Timur	BENDUNG/PEMBANGKIT	Thyssenkrupp Industrials Solutions
6	Pengujian Struktur Bangunan Gedung Hotel Karmila, Bandung	GEDUNG	Bpk. Adit
7	Investigasi Struktur Bangunan Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP), Jakarta	BENDUNGAN	PT. Adhi Karya
8	Investigasi Bangunan Hanggar 4 PT. Garuda Maintenance Facility (Gmf) Aeroasia, Jakarta	GEDUNG	PT. Wijaya Karya
9	Pengujian Kualitas Homogenitas Beton Pier Jembatan Pulau Gadang 1 Proyek Tol, Pekanbaru - Padang	JEMBATAN	PT. Wijaya Karya
10	Pengujian Komponen Struktur Bangunan Gedung Puskurbuk Kemendikbud, Jakarta	GEDUNG	PT.Cipta Mandiri Perencana

11	Investigasi Bangunan Gedung Hangar 4 Pt. Garuda Maintenance Facility (Gmf) Aeroasia, Jakarta	GEDUNG	PT. Garuda Maintenance Facility
12	Pengujian Komponen Struktur Bangunan Gedung Nusantara II, Jakarta	GEDUNG	PT.DIAS DESIGN CONSUL
13	Audit Struktur Gedung KPPN, Jakarta	GEDUNG	KPPN I
14	Investigasi Struktur Pondasi PJU Jawa Barat Dan Banten PT. Len Industri (Persero), Banten	GEDUNG	PT. Len Industri (Persero)
15	Pengujian Komponen Struktur Pier Head Ju Tiram Jalan Tol, Cibitung Cilincing	JEMBATAN	PT. Waskita Beton Precast
16	Penyelidikan Tanah Komplek Dago Resort, Bandung	GEDUNG	PT. BINANUSA
17	Pengujian Komponen Struktur Pelabuhan Pantoloan, Wani Dan Pelabuhan Donggala, Sulawesi Tengah	PELABUHAN	PT. ATRYA SWASCIPTA REKAYASA
18	Pengujian Pada Biem Pile Cap Jembatan Mahkota 2, Samarinda - Kalimantan Timur	JEMBATAN	PT. PDCM
19	Audit Forensik Dan Re-Analisis Struktur Pada Bangunan Gedung RSUD Labuan, Banten	GEDUNG	PT. Panca Guna Duta
20	Pengujian Pada Jembatan Ruas, Jambi - Padang	JEMBATAN	PT. Geotekno System Engineering
21	Investigasi Bangunan Gedung Hangar 4 Pt. Garuda Maintenance Facility (Gmf) Aeroasia Tbk, Jakarta	GEDUNG	PT. Wijaya Karya
22	Pengujian Komponen Struktur Bangunan Gedung Puskurbuk Kemendikbud, Jakarta	GEDUNG	PT.Cipta Mandiri Perencana
23	Pengujian Dan Analisa Keandalan Struktur Bangunan Gedung Kppn Gambir Kota, Jakarta	GEDUNG	Kantor Pelayanan Perbendaharaan
24	Pekerjaan Audit Building Vokasi Tahun 2021 (YTKI), Jakarta	GEDUNG	PT. Reka Prima
25	Investigasi Bangunan Gedung 37 Biofarma, Bandung	GEDUNG	PT. Wijaya Karya
26	Pengujian Rumah Sakit Borromeus, Bandung	GEDUNG	Rumah Sakit Borromeus
27	Pengujian Bangunan Rumah Tinggal, Jakarta	GEDUNG	PT. Prapapanca Engineering
28	Pengujian Kualitas Homogenitas Beton & Kedalaman Retakan Gedung Ikea, Bandung	GEDUNG	PT. Total Bangun Persada



29	Investigasi Bangunan Gedung Galeri Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI), Bandung	GEDUNG	Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI)
30	Pile Integrity Test Survey for RDMP Project Pertamina RU V, Balikpapan	JETTY	PT SOILENS
31	Pengujian Komponen Struktur Bangunan Gedung Puskurbuk Kemendikbud, Bandung	GEDUNG	PT.Cipta Mandiri Perencana
32	Investigasi Struktur Pondasi PJU Jawa Barat Dan Banten PT. LEN Industri, Banten	GEDUNG	PT. Len Industri
33	Investigasi Bangunan Gedung Hangar 4 Pt. Garuda Maintenance Facility (GMF) Aeroasia Tbk, Jakarta	GEDUNG	PT. Garuda Maintenance Facility (GMF)
34	Investigasi Bangunan Gedung PT. Unilever Indonesia Siliwangi-Cikarang, Jakarta	GEDUNG	PT. Prapanca Engineering
35	Investigasi Bangunan Gedung PT. Kereta Api Indonesia Stasiun, Bandung	GEDUNG	PT. Bumi Banda Parahyangan
36	Investigasi Bangunan Gedung PT. Unilever Indonesia Wall's, Cikarang	GEDUNG	PT. Prapanca Engineering
37	Investigasi pelabuhan, Batam	GEDUNG	PT. Syafril Janizar
38	Investigasi Bangunan Rumah Sakit Hermina Pasteur,Bandung	GEDUNG	Rumah Sakit Hermina Pasteur
40	Investigasi Gedung BJB KCP Cicadas, Bandung	GEDUNG	Bank BJB KCP
41	Pengujian Pada Bangunan Rm Notohamiprodjo, Jakarta	GEDUNG	PT. Syafril Janizar
41	Investigasi bangunan Gedung parkir PT jaya konstruksi manggala pratama, Jakarta	GEDUNG	PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk
42	Analisis Gedung Monumen Islam Samudera Pasai, Aceh	GEDUNG	DIRJEN KEBUDAYAAN
43	Pengujian Bangunan Masjid Yayasan Islam Nashirussunnah Permata (YASHIRUNA), Bandung	GEDUNG	Yayasan Islam Nashirussunnah Permata (YASHIRUNA)
44	Investigasi Struktur Tangga Putar Balai Krida, Jakarta Selatan	GEDUNG	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
45	Pengujian Kedalaman Retakan Struktur Bangunan Loading Arem, Kayu Putih	PELABUHAN	PT. BORNEO MITRA SINERGI

46	Investigasi Pada Struktur Bangunan Gedung Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak, Bandung	GEDUNG	PT ADHI KARYA
47	Pengujian Gedung PT. Motasa Indonesia, Wonosari	GEDUNG	PT. Motasa Indonesia
48	Pengujian dan Analisis Gedung Graha Permata sakti, Depok	GEDUNG	PT. Permata Husada Sakti
49	Pengujian Struktur Bangunan Gedung Universitas Trisakti, Jakarta	GEDUNG	PT CRP

**2022**

NO	PEKERJAAN	JENIS	NAMA KLIEN
1	Asessment Rusun Otorita Bida Sekupang	GEDUNG	PT Binanusa
2	Pemeriksaan dan Pengujian bangunan gedung Graha PT BKI	GEDUNG	PT. Biro Klasifikasi Indonesia
3	Investigasi Uji UPV Retakan Jalan Tol TBPP	JEMBATAN	PT Hajar Aswad
4	Investigasi Bangunan Gedung Boulevard, Jakarta	GEDUNG	Boulevard Jakarta
5	Structure Analysis Existing Construction Jetty 7A For RDMP Project Pertamina RU V, Balikpapan	GEDUNG	PT Soilens
6	Pile Intedrity Test Survey For RDMP Project RU V, Balikpapan	GEDUNG	PT Soilens
7	Pemeriksaan Gedung Community Center TMII, Jakarta	GEDUNG	PT. Adhi Karya
8	Pemeriksaan Gedung Penunjang SAMSAT, Malimping Banten	GEDUNG	PT. Pangko Megah KSO
9	Investigasi Gedung Pabrik Coklat Pasca Kebakaran PT Papandayan Cocoa Industries, Bandung	GEDUNG	Testindo
10	Pemeriksaan Gedung Pasar Sentra Industri, Banten	GEDUNG	PT. BINANUSA

11	Investigasi Gedung Bank BJB Syariah, Bandung	GEDUNG	Succofindo
12	Pengujian Rumah D'Java Residence, Cikarang	GEDUNG	PT. Prapanca Engineering
13	Investigasi Gedung PT Croda Indonesia, Jakarta	GEDUNG	PT. Prapanca Engineering
14	Investigasi Bangunan Gedung PT. HEINZ ABC, Jakarta	GEDUNG	PT. Prapanca Engineering
15	Pemeriksaan dan Pengujian Bangunan Dermaga, Jakarta	PELABUHAN	PT Biro Klasifikasi Indonesia
16	Investigasi Chemney PT. Kewalram Indonesia, Bandung	GEDUNG	PT Kewalram Indonesia
17	Investigasi Bangunan Jembatan Akses Gedung 33 PT BioFarma, Bandung	GEDUNG	PT BioFarma
18	Investigasi Bangunan Gedung Bale Panyawangan, Jakarta	GEDUNG	PT Widyadaya Bandaran
19	Investigasi Bangunan Bank Indonesia Denpasar, Bali	GEDUNG	Bank Indonesia Denpasar Bali
20	Investigasi Struktur Jembatan Talumolo II, Gorontalo	JEMBATAN	PT Widyadaya Bandaran
21	Pengujian Pada Lantai Genset Gedung Biofarma, Bandung	GEDUNG	PT BioFarma
22	Investigasi Bangunan Gedung Boulevard, Jakarta	GEDUNG	Gedung The Boulevard
23	Investigasi Komponen Struktur Gedung Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia, Jakarta	GEDUNG	PT Cipta Mandiri Perencana
24	Pemeriksaan Gedung PT Karya Sutarindo, Pasuruan, Jawa Timur	GEDUNG	PT Prapanca Engineering
25	Evaluasi Struktur Jembatan Kereta Api Lintas Cibat - Garut	GEDUNG	PT KAI
26	Investigasi Komponen Struktur Pintu Air DIR Dadahup Kabupaten Kapuas, Kalimantan	BENDUNG/PEM BANGKIT	PT,PP
27	Assessment Struktur Gedung Griya Karya, Semarang	PELABUHAN	PT.KAI
28	Pengujian Pemugaran Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri	GEDUNG	Gedung Pacansila Kementerian Luar Negeri

29	Pengujian Larutan Penetrant Pada Komponen Struktur Bangunan Hquarters Apartement PT. Pulau Intan, Bandung	GEDUNG	PT Pulauintan
30	Pengadaan Jasa Konsultasi Perencana Pemugaran Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta	GEDUNG	PT. Ruang Jelajah
31	Uji Struktur Bangunan Pasar Lingkungan, Jakarta	GEDUNG	Pemerintah kota Tangerang
32	Pemeriksaan Dan Pengujian Struktur Bangunan Gedung Unilever HPCL, Cikarang	GEDUNG	PT Prapanca Engineering
33	Pemeriksaan dan Pengujian Struktur Bangunan Gedung Rusunawa Sadang Serang, Banten	PELABUHAN	Gedung Rusunawa Sadang Serang
34	Investigasi Komponen Batuan Jembatan Besuk Kobo'an, Lumajang	GEDUNG	PT Adhi Karya
35	Investigasi Struktur Unilever Wall's Tahap 2, Cikarang	GEDUNG	PT Prapanca Engineering
36	Pengujian Bangunan Rumah Meadow Geen, Cikarang	GEDUNG	PT Prapanca Engineering
37	Pengujian Warehouse Obsesiman Jatiluhur, Bandung	JEMBATAN	PT. Alocita Mandiri
38	Uji Kualitas Beton 3 SPBU, Cirebon	GEDUNG	SPBU Cirebon
39	Pengujian Proyek WWTP, Pekanbaru	GEDUNG	PT,PP
40	Pengujian Pelabuhan Kawawu, Maluku	GEDUNG	PT. Sarana Antar Nusa Perekayasa
41	Pekerjaan Uji Struktur Box Traffic, Jakarta	GEDUNG	PT.Wijaya Karya
42	Pemeriksaan dan Pengujian Bangunan BFI Banjarmasin	GEDUNG	PT BFI FINANCE INDONESIA
43	Pengujian Bangunan Vania Interior Furnishing, Panglima Polim, Jakarta	GEDUNG	PT Tambarang Elastika Mas
44	Investigasi Jetty Ende, Bali & Gresik	PELABUHAN	PT Pratama Krida
45	Investigasi Struktur Gedung Rumah Sakit Mata, Cicendo	GEDUNG	PT. Cipta Indah Citra
46	Investigasi Gedung 3 Second, Pangandaran	GEDUNG	PT. Cipta Indah Citra

## 2023

NO	PEKERJAAN	JENIS	NAMA KLIEN
1	Investigasi Struktur Ruko Ahmad Yani Bandung	GEDUNG	CV Norisma Mandiri
2	Investigasi Struktur Rumah Sakit Pena 98, Jakarta	GEDUNG	RS Pena 98
3	Assessment Gedung Bank BJB Kepala Cabang Sukabumi	GEDUNG	PT Sucoffindo
4	Pengujian Bore Pile Eksisting Bekasi Mansion Apartement	GEDUNG	PT Perumnas Iida Group
5	Rebar Scan di Area Proyek Unit 2, Bandung	GEDUNG	PT Sanbe Farma
6	Rebar Scanner Gedung FTMF ITB, Bandung	GEDUNG	ITB
7	Uji Statis dan Dinamis Jembatan Sungai Ramba 12, Palembang	JEMBATAN	PT Pertamina
8	Pemeriksaan dan Pengujian Struktur Bangunan Gedung Hotel Progo, Bandung	GEDUNG	Hotel Progo
9	Soil and Structure Assessment Hangar 1 GMF Aeroasia, Jakarta	GEDUNG	PT GMF Aeroasia
10	Audit Struktur Gedung Kearsipan Bank BJB, Banten	GEDUNG	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
11	Assesment Bangunan Gedung Kantor P3D Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	GEDUNG	Jasa Konsultasi Perorangan
12	Assessment Gedung SMP Al Azhar. Bandung	GEDUNG	Management Yayasan Pesantren Islam Al- Azhar
13	Pekerjaan Struktur untuk Perkuatan Struktur Gedung Nusantara 1, Jakarta	GEDUNG	PT Pasya
14	Soil Test Akses Pelabuhan Warnasari Kota Cilegon	GEDUNG	Pelabuhan Warnasari
15	Pekerjaan Uji Kualitas Beton Bangunan Existing Kawasan Industri - Cikarang	GEDUNG	CV Biro Somif

16	Investigasi Struktur Perumahan Meadow, Cikarang	GEDUNG	PT Prapanca Engineering
17	Pengujian Gedung Personal Care, Cikarang	GEDUNG	PT Prapanca Engineering
18	Pengujian Bangunan Utility Building PT Upfield, Cikarang	GEDUNG	PT Prapanca Engineering
19	Investigasi Struktur Jembatan Penghubung Unilever Learning Center, Cikarang	JEMBATAN	PT Prapanca Engineering
20	Assesment Kualitas Jembatan WAI BINI, Namrole Maluku	JEMBATAN	PT Ormat
21	Investigasi Pemeriksaan Kualitas Beton pada Area Produksi Gedung Unilever Tea Based Beverages Factory, Cikarang	GEDUNG	PT Prapanca Engineering
22	Assesment Bangunan Gedung Mini Singapore, Jakarta	GEDUNG	Gedung Mini Singapore
23	Hammer Test Daihatsu, Cikarang	GEDUNG	Astra Daihatsu
24	Pengujian Kualitas Permukaan Beton Bangunan Hotel Mercure Nexa, Bandung	GEDUNG	Hotel Mercure
25	Pengujian Pile Integrity Test Dermaga PLTGU, Semarang	PELABUHAN	PLTGU Tambak Lorok
26	Pengujian Kualitas Permukaan Beton Bangunan Gedung RS Immanuel Bandung	GEDUNG	PT Cipta Indah Citra
27	Konsultasi Pekerjaan Penilaian Struktur Atas Gedung Eks Perpustakaan ITB Kampus Jatinangor Sumedang	GEDUNG	ITB Jatinangor
28	Pengujian Gedung Pernal Care PT Reckitt Benckisser Indonesia	GEDUNG	PT Prapanca Engineering
29	Gedung B2 Rusun PIK 2 Penggalan Cakung Jakarta	GEDUNG	Jaya Konstruksi
30	Pemeriksaan Struktur Pabrik PT Pacinesia Chemical Industry Tangerang Banten	GEDUNG	PT Pacinesia Chemical Industry

31	Investigasi Struktur Gedung B PPM School Of Management Kota Jakarta	GEDUNG	PT Tambarang Elastika Mas
32	Pemeriksaan Sistem Penulangan Beton Menggunakan Alat Profometer Rumah Tinggal, Jakarta	GEDUNG	PT Binanusa
33	Investigasi Struktur Bangunan Rumah Pompa dan Pondasi Trafo PT Krakatau Daya Listrik Cilegon	GEDUNG	PT Krakatau Konsultan
34	Pemeriksaan dan Pengujian Bangunan Gedung Jiwaseraya	GEDUNG	PT Tambarang Elastika Mas
35	Assessment Struktur Bangunan Gedung Astragraphia, Jakarta	GEDUNG	Astragraphia
36	Investigasi Pemeriksaan Konfigurasi Penulangan Struktur Gerdung RS Immanuel Kota Bandung	GEDUNG	PT Cipta Indah Citra
37	Pemeriksaan Kualitas Homogenitas Beton Bangunan Gedung Rumah Sakit Dharmais Jakarta	GEDUNG	RS Dharmais
38	Uji Kekerasan Permukaan Beton Gedung Jurusan Keperawatan Potekkes Kemenkes Bandung	GEDUNG	Poltekes Bandung
39	Assessment Struktur Bangunan Gedung Asahimas, Cilegon	GEDUNG	PT. Asahimas Chemical
40	Penelitian Kekutan Struktur Bangunan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kabupaten Bogor	GEDUNG	Pusdiklat Bogor
41	Investigasi Struktur Unilever Walls Ice Cream - Cikarang	GEDUNG	PT Prapanca Engineering
42	Investigasi Struktur Trestle Area PLTU PT Cirebon - Jawa Barat	PELABUHAN	PT Cirebon Power Service
43	Assessment Struktur Jembatan Proyek Sawung Garden Residence, Pamempeuk Garut	JEMBATAN	PT Reka Bentuk Rumah
44	Investigasi Underpass Cibubur	JEMBATAN	PT Secon Dwitunggal Putra
45	Pengawasan Millennium Wall Plastering Project	GEDUNG	Hotel Millenium

46	Pemeriksaan Bangunan Struktur Gedung Pasar RAU, Serang	GEDUNG	Pasar Induk Rau
47	Pemeriksaan Struktur Gedung Juanda 1 dan Juanda 2 Kementerian Keuangan, Jakarta	GEDUNG	Kementerian Keuangan
48	Pemeriksaan Struktur Gedung PT POS Indonesia, Bandung	GEDUNG	PT POS Indonesia
49	Investigasi Struktur Bangunan Suku Dinas Kesehatan, Jakarta	GEDUNG	PT Wahan Prakarsa Utama
50	Hammer Test Gedung Pasar Baru Square, Bandung	GEDUNG	Pasar Baru Bandung
51	Investigasi Struktur Area Jogging Track Kawasan SOR Adiwijaya, Tarogong	GEDUNG	Jogging Track Tarogong
52	Pengujian Pull Off Adhesion Test Jembatan Pelangas dan Jembatan Air Kadur, Bangka Belitung	JEMBATAN	CV. Astron Mega
53	Assessment Struktur Bangunan Gedung Staff 2 Lanud Sulaiman, Bandung	GEDUNG	Kementrian PU&PR
54	Pengujian Kedalaman Retakan Jalan TOL Purbaleunyi	JEMBATAN	PT. Qinar Raya Mandiri
55	Pekerjaan Penyelidikan Daya Dukung Tanah Proyek Pembangunan Indomaret, Garut	GEDUNG	CV Norisma Mandiri
56	Investigasi Struktur Gedung D RSBP, Batam	GEDUNG	PT Syapril Janizar
57	Investigasi Struktur Bangunan Gedung C Pusat Sumber Sumber Daya Mineral Bara dan Panas Bumi, Bandung	GEDUNG	PSDMBP
58	GPR dan PCL Pemetaan Utilitas dan Pondasi Skytrain Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Jakarta	GEDUNG	PT Jyabo Konstruksi Cahaya Indonesia
59	Insvestigasi Struktur Unilever Indonesia TBB Site PT Unilever Indonesia - TBB, Cikarang	GEDUNG	PT Prapanca Engineering
60	Uji UPV Struktur Box Pedestrian Box Jalan Tol Ruas, Pekanbaru	JEMBATAN	PT Hutama Karya Infrastruktur



61	Audit Kelaikan Struktuk Bangunan Dinas Lingkungan Hidup, DKI Jakarta	GEDUNG	PT Ramu Prima Persada
62	Assessment Struktur Bangunan Gedung Badan Pusat Statistik, Kalimantan Utara	GEDUNG	PT Fasade Kobetama Internasional
63	Investigasi Struktur Warehouse Finish Good Material PT Bekaert Indonesia, Karawang	GEDUNG	PT Prapanca Engineering
64	Uji Pull Off Adhesion Test Coating, Bandung	GEDUNG	PT ICO Technology
65	Assessment Struktur Eksiting Gedung Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IX Jayapura	GEDUNG	Balai Pengembangan Konpetensi Wilayah IX Jayapura
66	Uji Tarik Anchor pada Jembatan Kali Gawe, Semarang	JEMBATAN	PT Utama Karya
67	Assessment Struktur RAMP Gedung Balai Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kalimantan	GEDUNG	Balai Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
68	Investigasi Struktur Jembatan Kutai Lama, Kalimantan Timur	JEMBATAN	PT Pratama Daya Cahaya
69	Pekerjaan Kekerasan Permukaan Heton Hotel Grand Palma, Pangandaran	GEDUNG	Hotel Grand Palma Pangandaran
70	Pemeriksaan Jumlah dan Ukuran Tulangan Terpasang Jembatan Satu Kota Baru Parahyangan Jawa Barat	JEMBATAN	Jembatan Satu Kota Baru Parahyangan

2024

NO	PEKERJAAN	JENIS	NAMA KLIEN
1	Assessment Lahan PT Seacon Bintang Sejahtera	JALAN	PT Seacon Bintang Sejahtera
2	Assessment Bangunan Gedung Japfa Indoland Center Building, Surabaya	GEDUNG	PT Japfa Indoland Center
3	Assesment 1 Unit Concrete Vacuum Silencer PT Linde Indonesia, Gresik - Jawa Timur	TANKI	PT Linde Indonesia
4	Perencanaan Pembangunan Pagar Keliling Kantor Pajak Kalibata, Jakarta	GEDUNG	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing
5	Pekerjaan Audit Struktur Bangunan ISBI, Bandung	GEDUNG	Institut Seni Budaya Indonesia
6	Assessment Ruangan Bawah Kolam Renang (P1) Hotel Gaia, Bandung	GEDUNG	Hotel Gaia
7	Audit Struktur Gedung SGH di Jalan Proklamasi 46, Menteng, Jakarta Pusat	GEDUNG	Sinar Mutiara EPC
8	Assessment Bangunan PT LG Electronics Indonesia	GEDUNG	PT LG Electronics Indonesia
9	Audit Struktur Gedung 19 Biofarma, Bandung	GEDUNG	PT Biofarma
10	Pengujian Pull Out Test di Bendungan, Ciawi	BENDUNGAN	PT Guna Rogate Indah
11	Uji Tes Beton Struktur Bangunan Pagar Eksisting PT. Reckitt Benckiserpt. Reckitt Benckiser - Cilengsi	BANGUNAN	PT Prapanca Engineering
12	Pengujian Pull Off Bangunan Gedung Hotel Helios Resto, PIK Jakarta	GEDUNG	PT Tambarang
13	Assessment Bangunan Gedung Proyek BIOFARMA Cikarang.	GEDUNG	PT PP
14	Uji Pull Off Marmer Laminasi PET Foam	SAMPEL	PT Adiguna Masonry Indonesia
15	Assessment Bangunan RSUD Tugu Koja, Jakarta	BANGUNAN	RAP & Partners Architect
16	Konsultan Kajian Keandalan Struktur Bangunan Gedung PT. Universal Agri Bisnisindo (De Heus), Purwodadi	BANGUNAN	PT Dias Design

17	Pengujian Rebar Scan pada Bangunan Rumah di Depok	BANGUNAN	PT Bogor Servicia Integra
18	Assessment Pada 3 Titik Pondasi pendukung Balok (Beam) di Batam.	BANGUNAN	PT 3S Engineering
19	Pengujian Regangan untuk Re-Elevasi pada Rangka Baja Space Frame Bangunan Gedung Bandara Halim Perdana Kesuma, Jakarta.	GEDUNG	PT Anugrah Multi Cipta Karya

## KANTOR PUSAT

Jl. Gegerkalong Hilir No. 175  
Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung - 40151

## WORKSHOP

Jl. Cijerokaso No. 92 / Jl. Sarikaso No. 11 A  
Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung - 40151



MORE INFO



SCAN ME

binanusa\_id   
PT Binanusa Pracetak & Rekayasa   
marketing@binanusa.co.id   
0813 1313 3252   
(022) 200 3252 